

I Gede Cahyadi Putra, Putu Kepramareni, Ida Ayu Ratih Manuari, Luh Dwi Jayatri

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Rikhard Titing Christopher Bolang

FENOMENA FLYPAPER EFFECT: STIMULAN ATAU KEMUNDURAN DESENTRALISASI FISKAL?

Maria Avila Ndese, Minarni A. Dethan, Nikson Tameno

ANALISIS IMPLEMENTASI ACTIVITY BASED COSTING (ABC) DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA DIAN JATI MEBEL

Sumayyah, Inna Zahara

SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: EQUITY CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF INVESTOR

Andin Cipta Putri, Nurullaili Mauliddah, Budi Wahyu Mahardhika, Didin Fatihudin

ASPEK KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUSTAINABILITY UMKM DI KECAMATAN TARIK SIDOARJO

Yohana Febiani Angi

PERLAKUAN AKUNTANSI KARBON PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON CYCLICALS DI INDONESIA

Renta Yustie, Novi Theresia Kiak, Betty Silvia Ayu Utami

FAKTOR-FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI STATUS KEPEMILIKAN RUMAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2022

Rahil, Dwiyatmoko Puji Widodo, Yuni Siti Nuraeni

FPENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2018-2023

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 12, No. 2, Oktober 2024

Hal. 44 - 106

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFA.

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFA

Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

REVIEWER

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com
(Hons),Ph.D., Ak. (Universitas Negeri
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerihi, SE,
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,
M.Rech., Ak., CFA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DAFTAR ISI

44 – 52

- **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**
I Gede Cahyadi Putra
Putu Kepramareni
Ida Ayu Ratih Manuari
Luh Dwi Jayatri

53 – 60

- **FENOMENA *FLYPAPER EFFECT*: STIMULAN ATAU KEMUNDURAN DESENTRALISASI FISKAL?**
Rikhard Titing Christopher Bolang

61 – 71

- **ANALISIS IMPLEMENTASI *ACTIVITY BASED COSTING (ABC)* DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA DIAN JATI MEBEL**
Maria Avila Ndese
Minarni A. Dethan
Nikson Tameno

72 - 78

- ***SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: EQUITY CROWDFUNDING* DALAM PERSPEKTIF INVESTOR**
Sumayyah
Inna Zahara

79 - 87

- **ASPEK KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP *SUSTAINABILITY* UMKM DI KECAMATAN TARIK SIDOARJO**
Andin Cipta Putri
Nurullaili Mauliddah
Budi Wahyu Mahardhika
Didin Fatihudin

88 - 98

- **PERLAKUAN AKUNTANSI KARBON PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON CYCLICALS DI INDONESIA**

Yohana Febiani Angi

99 - 106

- **FAKTOR-FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI STATUS KEPEMILIKAN RUMAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2022**

Renta Yustie

Novi Theresia Kiak

Betty Silvia Ayu Utami

107 - 115

- **PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2018-2023**

Rahil

Dwiyatmoko Puji Widodo

Yuni Siti Nuraeni

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

I Gede Cahyadi Putra

Universitas Mahasaraswati Denpasar
gdcahyadi@unmas.ac.id

Putu Kepramareni

Universitas Mahasaraswati Denpasar
pkepramareni@unmas.ac.id

Ida Ayu Ratih Manuari

Universitas Mahasaraswati Denpasar
ratih.manuari@unmas.ac.id

Luh Dwi Jayatri

Universitas Mahasaraswati Denpasar
dekyajayatri12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *return on asset*, dan *current ratio* terhadap harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *return on asset* berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek. pada harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Kata Kunci: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kinerja keuangan, harga saham.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, return on assets, and current ratio to stock prices in technology companies listed on the ratio on the share price of technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Indonesia Stock Exchange. This research is a quantitative type research. The data collection method uses purposive sampling method with several predetermined criteria that have been determined. The analytical tool used to test the hypothesis is multiple linear analysis. The results showed that institutional ownership and return on assets have a positive effect on stock prices in technology companies listed on the Stock Exchange. on stock prices in technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2022. Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2022. Meanwhile, managerial ownership, independent commissioners, and current ratio have no effect on stock prices in technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2022. on technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2022.

Keywords: Institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner, financial performance, stock price.

PENDAHULUAN

Saham merupakan sebuah surat yang menandakan kepemilikan individu ataupun badan usaha di sebuah perusahaan, dimana jika individu ataupun badan usaha memiliki saham perusahaan itu maka individu ataupun badan usaha tersebut juga memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Dalam pasar modal investasi saham banyak diminati oleh calon investor maupun investor karena modal yang harus digunakan tidak besar dan keuntungan yang diperoleh biasanya lebih besar. Sebelum membeli saham calon investor maupun investor akan mengamati harga saham di pasar modal.

Harga saham ialah perjanjian harga yang sudah dibentuk atau yang sudah disepakati oleh pihak pasar sesudah adanya penawaran dan transaksi yang berlaku di pasar modal. Harga pada saham di pasar modal bisa mengalami kenaikan maupun penurunan yang disebabkan oleh penjualan dan pembelian yang terjadi di pasar modal. Selain itu ada dua faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pada harga saham kedua faktor tersebut adalah faktor internal yang merupakan penyebab di dalam perusahaan itu sendiri dan faktor eksternal yang disebabkan oleh luar perusahaan. Faktor eksternal yaitu karena adanya kebijakan pemerintah adanya isu-isu yang beredar, dan fluktuasi mata uang asing. Faktor internal tersebut seperti kebijakan yang ada pada perusahaan, kepemilikan dari saham dan yang terakhir kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham akan meningkat dan sebaliknya jika kinerja perusahaan menurun maka harga saham akan menurun sehingga dengan hal tersebut pemilik perusahaan akan meminta

Perusahaan PT. Metrodata Electrics Tbk (MTDL) yang bergerak di bidang usaha penjualan berbagai jenis komputer dan produk teknologi lainnya yang berkaitan dengan teknologi. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan rata-rata mengalami kenaikan maupun penurunan atau yang disebut dengan fluktuasi. Pada tahun 2020 menunjukkan harga saham sebesar Rp. 1.580, tahun 2021 menunjukkan harga saham sebesar Rp. 3.820, dan harga saham tahun 2022 menunjukkan harga

saham sebesar Rp. 580. Harga saham dari tahun 2020 menuju 2021 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 2,240 dan mengalami penurunan yang sangat deratis dari tahun 2021 menuju 2022 sebesar Rp. 3.240. Dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan tersebut bisa mengalami kenaikan dan penurunan harga saham atau fluktuasi. Fluktuasi harga saham disebabkan oleh beberapa faktor yang ada seperti kinerja perusahaan yang buruk. Harga saham perusahaan sektor teknologi saat terjadinya covid-19 pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup lumayan dari tahun sebelumnya hal ini karena teknologi saat pandemi saat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan pembelajaran daring, belanja online, *work from home* dan masih banyak lagi karena banyak dibutuhkan masyarakat maka banyak perusahaan besar atau institusi besar yang membeli saham mereka sehingga menimbulkan kenaikan harga saham. Dalam pasar modal juga perlu dilakukan penerapan *coporate governance* dan hal ini juga menjadi isu yang sangat menarik bagi investor maupun calon investor karena pasar modal juga memiliki resiko yang sangat tinggi karena adanya aktivitas yang terjadi pasar modal dimana terjadinya transaksi memperjual belikan lembar-lembar kertas yang memiliki nilai tertentu. Ditambah dengan adanya mekanisme dari *good corporate governance* yang diharapkan bisa untuk memaksimalkan pengawasan yang terjadi pada suatu perusahaan antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen, hal ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pihak investor untuk menginvestasikan modalnya sehingga banyaknya investor melakukan permintaan akan berdampak di harga saham pasar modal.

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu mekanisme dari *good corporate governance* yang dimana kepemilikan ini ialah kepemilikan saham oleh suatu lembaga maupun institusi semacam bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan besar lainnya. Institusi-institusi keuangan besar biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan informasi. Kepemilikan institusional dapat memberikan investor akses pada analisis dan informasi yang mungkin tidak tersedia secara umum. Pemegang saham institusional yang besar dapat memiliki pengaruh

dalam keputusan strategis perusahaan.

Kepemilikan manajerial ialah kepemilikan asset saham yang dimana manajer pengelolanya juga menjadi investor saham dalam perusahaan tersebut. Manajer juga turut berpartisipasi dalam menentukan keputusan perusahaan. Terbentuknya kepemilikan manajerial dalam saham perusahaan maka dianggap berpotensi menyesuaikan perbedaan setiap kepentingan yang diperlukan antar manajemen dengan pemegang saham untuk meminimalisir konflik.

Komisaris Independen adalah satu-satunya anggota dewan komisaris yang bersumber dari luar manajemen investasi dan tidak mempunyai ikatan koneksi kerja sama dengan anggota dewan direksi lainnya maupun dengan anggota dewan direksi itu sendiri, sehingga komisaris independen ini terbebas dari tindakan independennya atau penyelesaian masalah yang mengesampingkan kepentingan pribadinya dan menghindari benturan kepentingan. Adanya komisaris independen di pasar modal bertanggung jawab guna melindungi pemegang saham, dimana khususnya pada pemegang saham independen dari praktik kecurang atau tindakan yang melakukan kejahatan pasar modal.

Return on asset adalah komponen indikator profitabilitas yang mengidentifikasi kemahiran perusahaan dalam mendatangkan keuntungan atau yang disebut dengan laba. Guna dari rasio ini digunakan sebagai ukuran sejauh mana perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk mencapai keuntungan bersih atau laba bersih.

Current ratio merupakan komponen terpenting dari rasio likuiditas yang mempengaruhi kemahiran atau efektivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran, mengurangi jumlah utang yang dimilikinya, atau memenuhi kewajiban yang mungkin dimilikinya kepada para kreditur, termasuk yang berkaitan dengan utang yang akan segera habis tempo.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami hal tersebut untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari. Semakin besar perusahaan maka akan semakin perlunya untuk terjadi pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan. Pemegang saham bertindak sebagai pemilik dan manajer merupakan pengendali perusahaan pemisahan peran ini terjadi karena pemegang saham tidak dapat lagi mengikuti kegiatan perusahaan setiap harinya. Perbedaan kepentingan ini dikenal dengan nama konflik keagenan implikasi teori keagenan terhadap konsep *corporate governance* adanya pemberian insentif dan melakukan monitoring (pengawasan) mekanisme insentif mendorong para manajer bertindak mendorong manajer dalam memaksimalkan untuk kesejahteraan pemegang saham berupa insentif seperti gaji dan insentif berbasis kinerja, seperti pemberian saham perusahaan, dan kebijakan kompensasi lainnya.

Teori Sinyal

Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan suatu isyarat untuk memberikan sinyal kepada pihak pengirim untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat yang dapat dimanfaatkan oleh penerima. Dengan sinyal tersebut diharapkan penerima menerima informasi akan mengambil tindakan ataupun keputusan sesuai dengan pemahaman informasi yang diterima tersebut. Adanya isyarat merupakan suatu sinyal yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada pihak investor guna untuk menilai bagaimana prospek perusahaan tersebut. Para investor dapat melihat sinyal tersebut melalui laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut dan sudah dapat diakses oleh investor maupun calon investor. Berdasarkan hal tersebut pihak eksternal seperti calon investor maupun investor akan dapat sinyal apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik ataupun buruk atau prospek masa depan dari perusahaan tersebut akan

selalu menguntungkan atau tidak sehingga investor dapat menganalisis hal tersebut melalui isyarat sinyal.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini ada 5 hipotesis yaitu Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga keuangan, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau lembaga keuangan besar lainnya. Meningkatnya kepemilikan institusional ini akan memberikan pengaruh positif terhadap investor lainnya hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional terdiri dari lembaga keuangan besar dimana sebelum melakukan investasi atau menanamkan modal kepemilikan institusional ini akan melakukan riset yang mendalam dan menganalisis secara mendalam mengenai perusahaan yang akan ditanamkan modal maka hal tersebut akan memberikan sinyal positif terhadap investor dimana akan meningkatkan permintaan pada saham yang akan mempengaruhi harga saham. Institusi-institusi keuangan besar biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan informasi. Kepemilikan institusional dapat memberikan investor akses pada analisis dan informasi yang mungkin tidak tersedia secara umum. Sehingga hipotesis pertama adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap harga saham.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dimana manajer juga sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal yang positif untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi karena manajer akan ikut serta dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Semakin meningkatnya proposi dari kepemilikan manajerial pada perusahaan maka manajemen akan berusaha meningkatkan kinerjanya dan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham juga yang tidak lain adalah dirinya sendiri maka hal ini dapat mengurangi terjadinya perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajemen. Jika manajer membeli saham perusahaan ini maka dapat memberikan sinyal

positif terhadap investor bahwa kinerja perusahaan ini bagus. Hal ini akan membuat investor percaya menanamkan modalnya sehingga semakin banyak investor yang menanamkan modalnya akan meningkatkan permintaan yang dapat mempengaruhi dari harga saham, sehingga hipotesis kedua adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap harga saham

Komisaris Independen adalah salah satu anggota dewan komisaris yang bersumber dari luar manajemen investasi dan tidak mempunyai ikatan koneksi kerja sama dengan anggota dewan direksi lainnya maupun dengan anggota dewan direksi itu sendiri. Keberadaan komisaris independen dan pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik saham minoritas (Lapriksa & Ela, 2018). Pengawasan yang efektif pada sebuah perusahaan diduga akan meningkatkan minat investor untuk membeli saham perusahaan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi harga saham (Sitorus et al., 2015). Selain itu dengan adanya komisaris independen akan meningkatkan transparansi dalam perusahaan. Informasi yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga hipotesis ketiga adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap harga saham

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan guna menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi *return on assets* menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan kinerja suatu perusahaan dianggap semakin baik karena perusahaan dapat mengelola asetnya untuk mencapai keuntungan. Sehingga daya tarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut pun akan meningkat. Meningkatnya daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut diminati oleh investor, karena deviden yang diperoleh akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga suatu saham dari perusahaan di pasar modal yang akan semakin meningkat, sehingga hipotesis keempat adalah *Return on assets* Berpengaruh Positif Terhadap Harga Saham

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan akun-akun aset lancar dan

kewajiban lancar guna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin meningkatnya *current ratio* menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan aktiva lancarnya dengan baik guna memenuhi kewajibannya sehingga hal ini membuat para investor percaya perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang sehat karena dapat membayar hutang jangka pendeknya dan investor percaya perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang sehat, maka investor akan menanamkan modalnya sebanyak-banyaknya pada perusahaan tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi peningkatan permintaan dan mempengaruhi harga saham, sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah *current ratio* berpengaruh positif terhadap harga saham.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data numerik yang bertujuan untuk menentukan hubungan variabel atau untuk menguji hipotesis secara empiris dan menganalisis data secara statistik. Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme, untuk mempelajari suatu populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data memakai peralatan penelitian dan menganalisis data yang sifatnya kuantitatif untuk menguji hipotesis awal (Sugiyono, 2022). Creswell mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan untuk menguji teori-teori obyektif dengan memeriksa hubungannya antara variabel. Variabel-variabel tersebut, diukur sehingga sejumlah data dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Data penelitian ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia pada perusahaan teknologi dengan periode tahun 2020-2022. Penentuan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan berbagai kriteria - kriteria yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil olah data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
HS	33	50	9525	1594.70	2422,020
<u>Kepemilikan</u> <u>Institusional</u>	33	0,0823	1,000	0,448154	0,2611172
<u>Kepemilikan</u> <u>Manajerial</u>	33	0,0004	0,6570	0,230237	0,2223909
<u>Komisaris</u> <u>Independen</u>	33	0,2500	0,6667	0,458081	0,1213438
Return On Assets	33	0,0011	1,0000	0,171457	0,2438991
Current Ratio	33	0,0040	5273,9124	169,220499	916,4548130
Valid N	33				

Sumber: Data diolah (2023)

Nilai minimum sebesar 0,0823 dan nilai maksimum sebesar 1,000 dengan rata-rata sebesar 0,448154 serta nilai *std.deviation* sebesar 0,2611172. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,0004 dan nilai maksimum sebesar 0,6570 dengan rata-rata sebesar 0,230237 serta nilai *std.deviation* sebesar 0,2223909. Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,2500 dan nilai maksimum sebesar 0,6667 dengan rata-rata sebesar 0,458081 serta nilai *std.deviation* sebesar 0,1213438. Variabel *return on assets* memiliki nilai minimum sebesar 0,0011 dan nilai maksimum sebesar 0,0011 dengan rata-rata sebesar 0,171457 serta nilai *std.deviation* sebesar 0,2438991. Variabel *current ratio* memiliki nilai minimum sebesar 0,0040 dan nilai maksimum sebesar 5273,9124 dengan rata-rata sebesar 169,220499 serta nilai *std.deviation* sebesar 916,4548130.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.718	1.704		2.768	.010
KINST	3.882	1.681	.631	2.309	.029
KM	3.419	1.959	.473	1.745	.092
KOMIND	-2.668	2.249	-.201	-1.186	.246
ROA	.073	.026	.455	2.869	.008
CR	.000	.000	.121	.782	.441

Sumber: data diolah (2023)

Hasil pengujian hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap harga saham dengan nilai sig 0,029 dan nilai t hitung sebesar 2,309. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan institusional akan memberikan sinyal positif terhadap investor lainnya karena mereka menganggap bahwa kepemilikan institusional yang terdiri dari lembaga keuangan besar menanamkan modal mereka di perusahaan tersebut sudah melakukan riset dan menganalisis lebih mendalam mengenai pertumbuhan ataupun kestabilan perusahaan sehingga hal tersebut membuat investor lainnya ikut menanamkan modal mereka, hal tersebut membuat peningkatan permintaan pada saham yang akan mempengaruhi harga saham perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai sig 0,092 dan nilai t hitung sebesar 1,745. Hal ini dikarenakan. Kepemilikan saham oleh manajerial memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil dalam perusahaan jika dibandingkan dengan total saham yang beredar di pasar. Dalam konteks ini, transaksi atau perubahan kepemilikan individu mungkin tidak memiliki dampak besar pada harga saham secara keseluruhan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai sig 0,246 dan nilai t hitung sebesar -1,186. Hal ini dikarenakan Komisaris independen tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Keputusan-keputusan ini lebih sering dibuat oleh manajemen eksekutif perusahaan. Oleh karena itu, dampak komisaris independen terhadap keputusan operasional yang dapat mempengaruhi kinerja finansial mungkin terbatas.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan *return on assets* berpengaruh positif terhadap harga saham ROA mencerminkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap aset yang dimilikinya. Meningkatnya ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asetnya dengan lebih efisien untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Investor cenderung memberikan nilai lebih

tinggi kepada perusahaan yang dapat mencapai efisiensi operasional yang tinggi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai sig 0,441 dan nilai t hitung sebesar 0,782. Hal ini dikarenakan para investor lebih tertarik atau fokus pada profitabilitas perusahaan daripada likuiditas perusahaan karena investor lebih tertarik pada keuntungan yang didapatkannya. Investor cenderung melihat gambaran keseluruhan dari sejumlah rasio dan faktor keuangan lainnya untuk membuat keputusan investasi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapat kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan *return on assets* berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan teknologi sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Keterbatasan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya membahas atau terfokus pada variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *return on assets*, dan *current ratio* yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi harga saham mungkin kedepannya penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham seperti kebijakan pemerintah dan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada itu yang dapat mempengaruhi harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F., Diyan, L., (2022). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2019. *Kalbisiana: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*. 8(3), 3565-3582.
- Aprilia, A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, Kepemilikan

- institusional dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020. *Jira: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 11(6), 2460-0585.
- Astuti, P., Sari, L., Y., & Reny, W., (2018). Analisis Pengaruh *Return On Equity, Earning Per Share, Price To Book Value, Book Value Per Share, Price Earning Ratio* dan Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi: Universitas Borobudur*. 20(2), 170-183.
- Astuti, P., Sari, L., Y., & Reny, W., (2018). Analisis Pengaruh *Return On Equity, Earning Per Share, Price To Book Value, Book Value Per Share, Price Earning Ratio* dan Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi: Universitas Borobudur*. 20(2), 170-183.
- Aulia, H., (2017). Pengaruh *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Harga Saham (Studi Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Skripsi. Universitas Lampung.
- Ayu, R., Pratiwi, S., & Santoso, B. H. (2019). Pengaruh ROA, ROE, EPS dan CR terhadap harga saham perusahaan *Food and Beverages* di BEI. *Jira: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(8), 2461-0593.
- Bagiana, (2022). *Corporate Governance tinjauan teori dan praktis*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Boston: Cengage.
- Dewi, I. K., & Solihin, D. (2020). Pengaruh *Current ratio* Dan *Net Profit Margin* Terhadap Harga saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Feasible*. 2(2), 183-191.
- Efridani Lubis (2019). Penerapan *Good Governance* Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*. 5(2), 48-76.
- Fahmi, (2014). Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal, Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fariantin, H. E, (2019). Pengaruh *return on asset, profi margin* terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ganec Swara: Jurnal Unmas Mataram*. 13(1), 136-145
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis *Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A., (2020). Pengaruh *current ratio* dan *debt to equity ratio* terhadap harga saham pada perusahaan plastik dan kemasan. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. 1(1), 29-40
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia* (A. D. Sulistyia (ed.); 1st ed.). Absolute Media.
- Hery, (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Irfani, R., Anhar, M., & Nasional Madani, P. (2019). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap harga saham (Studi empiris: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017). *Jurnal STEI Ekonomi*. 28(1). 143-152
- Jogiyanto, (2010). Teori portofolio dan analisis Investasi. Edisi ke-7, BPFE Yogyakarta.
- Kasmir, (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairunnisa, T., & Rikumahu. B., (2018). Pengaruh jumlah dewan direksi, proposi dewan komisaris independen, *return on assets*, dan *current ratio* terhadap harga saham (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* Vol 23. No 2.
- Khairunnisa, T., & Rikumahu. B., (2018). Pengaruh jumlah dewan direksi, proposi dewan komisaris independen, *return on assets*, dan *current ratio* terhadap harga saham (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*. 5(3).
- Kurniawati, L., Manalu, S., Joyo, R., & Octavianus, N. (2015). Pengaruh

- kepemilikan institusional terhadap kebijakan deviden, harga saham pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. *Jurnal Manajemen*. 15(1). 59-74.
- Lestari, D., (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Mujaddidi, A. S., (2023). Pengaruh *return on asset*, *earning per share*, dan *current ratio* terhadap harga saham perusahaan otomotif. *Shafin: Sharina Finance and Accounting Journal*. 3(1), 1-17.
- Nafia, N., & Wibowo, D., (2020). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, DER, SIZE, DPR, ROE terhadap harga saham. *Jira: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9(3), 2460-0585.
- Nandaria, (2019). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris Independen, dan kinerja keuangan terhadap harga saham dengan *coporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. Skripsi. *Falkutas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten*.
- Nurulrahmatiah, N., & Pratiwi, (2020). Pengaruh *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2018. *Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima* 11(2), 2615-4978.
- Octaviani, Manggantar, Joy (2018). Pengaruh struktur modal, kepemilikan manajerial, dan kebijakan deviden terhadap harga saham (Studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2012-2016). *Jurnal EMBA*. 6(3). 1138-1147.
- Oktaviani, Citra, (2020). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Khususnya *Consumer Goods* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pongkorung, A., Tommy, P., & Tulung E., J., (2018). Pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap harga saham industri keuangan nonbank yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. *Jurnal EMBA* 6 (4), 3048-3057.
- Rahmi, F., & Dahar, R (2021). Dampak *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan, dan *intellectual capital* pada harga saham. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 23(2), 1693 -3273
- Rahmadewi, P. W., & Abundanti, N. (2018). Pengaruh EPS, PER, CR, dan ROE terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. *E-jurnal Manajemen Unud* 7(4), 2106–2133.
- Ramadhan, A. R. (2020). Pengaruh ROA, ROE, DAN CR terhadap harga saham perusahaan *property dan real estate*. *Jirm: Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. 9(1)
- Retno Anjasari, D., Florencia Panggabean, M., Hidayat, R. N., (2020). Pengaruh *return on asset*, *return on equity*, *earning per share* terhadap harga saham perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 (studi kasus Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*. 2(2), 1858 – 1358.
- Rosdiana, W., & Ventje, I., (2016). Pengaruh *return on asset* (ROA), *net profit margin* (NPM), dan *earning per share* (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal EMBA*. 4(2), 518-529.
- Saprudin, S., (2019). Pengaruh kepemilikan Manajerial, *Leverage*, dan profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur. *Jisamar: Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*. 3(3), 2598-8719.
- Siregar, Q. R., & Farisi, S. (2018). Pengaruh *return on assets* dan *earning per share* terhadap harga saham. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 81–89.
- Sudana, (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga

- Sugeng, R., (2019). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan manajerial, rasio hutang terhadap ekuitas, dan rasio lancar terhadap harga saham. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 8(1), 35-46.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Deepublish.
- Suryawan, Wirajaya (2017). Pengaruh *Current Ratio, Debt To Equity Ratio* dan *Return on asset* pada Harga Saham pada perusahaan Indeks LQ-45 periode 2013-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 21(2), 1317-1345.
- Susanti, W., Kesuma, I. M., Maya, W., Putri, N., & Sari, R. (2021). *Pengaruh return on asset, return on equity, net profit margin* terhadap harga saham pada Perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan minyak dan gas di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. *Journal Ekombis Review* 9(2), 171–182.
- Tamba, A., & Sidik, S. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal dan *leverage* terhadap harga saham. *TDEJ: Journal Accounting, Management, and Finance* 1(1), 53-63.
- Tumandung, C. O., Murni, S., & Baramuli, D. N. (2017). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2011-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1728–173.
- Udayana Dwi, M., I., & Miartana Putu, I., (2018). Komisaris Independen, Komite Audit, Struktur Modal, Profitabilitas, dan Harga Saham. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 1829-8486.
- Ulum, B., (2018). Pengaruh Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014. *Gema Ekonomi jurnal falkutas ekonomi* 6(2), 125-137.
- Wardani, L., Ainiyah, N., & Imdiddaviq, M. B. (2022). Pengaruh *coporate governance* dan kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. *Jurnal EMBA*. 6(3), 1138–1147.

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT*: STIMULAN ATAU KEMUNDURAN DESENTRALISASI FISKAL?

Rikhard Titing Christopher Bolang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
rikhard.bolang@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dampaknya terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menggunakan metode analisis regresi data panel berdasarkan pilihan model yang dilakukan diantaranya *Random Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Common Effect Model* menyimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* melalui Uji Chow dan Hauman Test. Hasil pengujian menggunakan *Fixed Effect Model* menjelaskan bahwa secara statistik variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah namun tidak berlaku untuk variabel PAD. Secara analisis eksistensi *flypaper effect* di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpulkan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* yang dilihat berdasarkan nilai koefisien variabel Dana Perimbangan yang lebih besar dari pada nilai koefisien PAD. Sehingga berdasarkan analisis ini disimpulkan terdapat kemunduruan desentralisasi fiskal apabila penggunaan terhadap Dana Perimbangan salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) masih digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja daerah oleh Pemerintah Daerah.

Kata kunci : *Fixed Effect Model, Flypaper Effect, Dana perimbangan, PAD, Belanja Daerah.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the flypaper effect phenomenon in East Nusa Tenggara (NTT) Province and its impact on the implementation of fiscal decentralization in East Nusa Tenggara (NTT) Province. Using the panel data regression analysis method based on the choice of models carried out including Random Effect Model, Fixed Effect Model, and Common Effect Model which concluded that the best model used in this study was the Fixed Effect Model through the Chow Test and Hauman Test. The results of the test using the Fixed Effect Model explain that statistically the Balancing Fund variable has a significant effect on regional spending but does not apply to the PAD variable. In terms of the existence of the flypaper effect in the Regency/City government of East Nusa Tenggara Province (NTT), it is concluded that there is a flypaper effect phenomenon which is seen based on the coefficient value of the Balancing Fund variable which is greater than the coefficient value of PAD. So based on this analysis, it is concluded that there is a decline in fiscal decentralization if the use of the Balancing Fund, one of which is the General Allocation Fund (DAU), is still used as a source of financing for regional spending by the Regional Government.

Keywords : *Fixed Effect Model, Flypaper Effect, Balancing Fund, PAD, Regional Expenditure.*

PENDAHULUAN

Fedelino (2010) menjelaskan bahwa Desentralisasi fiskal melibatkan pendefinisian ulang peran dan tanggung jawab berbagai tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Khoirunisa & Sulaeman (2022) menjelaskan lebih lanjut bahwa Desentralisasi fiskal telah lebih aktif diadopsi di Indonesia dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara implementasi disatukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD).

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD) ini memberikan dampak terhadap pelaksanaan dari Dana Perimbangan (*Fiscal Equalization*). Dana perimbangan (*Fiscal Equalization*) terdiri dari tiga jenis transfer yang dialokasikan oleh pusat ke daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan dari dana perimbangan ini adalah untuk pemenuhan desentralisasi fiskal di daerah. Di sisi lain, daerah memiliki pendapatan lain yang merupakan penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah atau yang biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan UUHKPD ini memberikan dampak terhadap penggunaan dari dana perimbangan dan PAD. Dikarenakan secara rata-rata penggunaan dana perimbangan ini masih dipakai salah satunya untuk belanja pegawai sehingga program daerah tidak berjalan dengan baik, fenomena ini disebut sebagai *Flypaper Effect*.

Flypaper effect merupakan fenomena dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat (hibah) dalam membiayai pengeluarannya (Rahmatillah *et al.*, 2023). Penelitian mengenai *flypaper effect* telah banyak dilakukan, beberapa di antaranya adalah (Baekgaard & Kjaergaard, 2016); (Kjaergaard,

2015); (Korzhenevych & Langer, 2016); (Sour, 2013). Hal yang sama terjadi juga di Indonesia. Penelitian mengenai *flypaper effect* di Indonesia telah banyak dilakukan, beberapa di antaranya adalah (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022); (Swasito, 2021); (Swasito, 2021); (Khairy, 2024). Hasil penelitian sebelumnya banyak membahas berkaitan dengan fenomena *flypaper effect* di beberapa negara bahkan di Indonesia terkhususnya oada tinggal regional atau daerah. Namun masih sedikit *literature* mengenai fenomena *flypaper effect* yang secara khusus membahas fenomena tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dampaknya terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

KAJIAN TEORI

Studi Literatur

Penelitian dari Pettersson (2020) mengenai *The flypaper effect: A study of the flypaper effect in Swedish municipalities* menjelaskan bahwa Hasil dari model empiris menunjukkan bahwa terdapat ketidakstabilan dalam pengeluaran layanan kesejahteraan kota, yang sejalan dengan kerangka teoritis dan literatur sebelumnya. Hasil ini menyiratkan bahwa layanan kesejahteraan di masa depan akan menjadi lebih mahal jika didanai oleh peningkatan hibah pemerintah, daripada oleh peningkatan pendapatan pajak.

Tasri (2018) mengenai *The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia* menjelaskan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah. Namun, DAU lebih mempengaruhi belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi pada pemerintah provinsi di Indonesia yang mana respon belanja pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh DAU daripada PAD. Hal ini terjadi karena pemerintah provinsi masih bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi pengeluarannya yang diilustrasikan dengan transfer DAU yang tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia belum efektif. Dengan demikian,

pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Parajuli (2023) mengenai *Does the Flypaper Effect Exist in Developing Countries? An Analysis of 2017-2019 Budget Data of Nepalese Local Governments* menjelaskan bahwa *Flypaper Effect* dari total hibah terhadap belanja daerah ditemukan paling tinggi di tingkat daerah di wilayah Perbukitan, yang dapat disebabkan oleh lebih banyak permintaan untuk kegiatan sosial-ekonomi mengingat jumlah penduduk yang lebih tinggi dan medan yang sulit untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan. Dana hibah pemerataan pada belanja daerah menunjukkan adanya *Flypaper Effect*. *Flypaper Effect* dari dana hibah wajib signifikan dan dapat diamati di banyak daerah.

Hapsoro & Yoduke (2019) dengan topik *Fiscal illusion detection and their effect on economic growth in Sulawesi* menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan adanya ilusi fiskal berupa *flypaper effect* dan ilusi utang pada belanja pemerintah daerah. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan adanya ilusi fiskal pada belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Landasan teori

Flypaper effect pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1960 oleh James Henderson dan Edward Gramlich. Mereka mencari penjelasan tentang bagaimana demografi dan ekonomi berkorelasi dengan anggaran pemerintah. Untuk melakukan hal ini, mereka menetapkan dan memperkirakan persamaan permintaan berdasarkan maksimalisasi subjek utilitas warga negara, sehingga batasan pendapatan warga ditentukan sebagai jumlah pendapatan pribadi ditambah bagian warga negara dari hibah pemerintah. Model teoritis ini menyiratkan bahwa uang adalah uang - pendapatan pribadi dan bagian hibah pemerintah harus mempunyai dampak yang sama terhadap pengeluaran (Inman, 2008)

Namun, hasilnya cukup tidak terduga, satu dolar tambahan dari pendapatan pribadi meningkatkan pengeluaran sebesar 0,02 – 0,05 dolar, tetapi satu dolar tambahan dalam hibah pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar 0,3 - 1 dolar. Oleh karena itu, hasilnya ternyata

bertentangan dengan apa yang tersirat dalam model teoritis yang dikembangkan. Sehingga Arthur Okun mengutarakan frasa terkenal bahwa efek hibah pemerintah pada pengeluaran seperti *flypaper*, uang menempel di tempat yang dikenainya (Inman, 2008).

Pemerintah daerah menggunakan hibah yang diterima dari pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja daerah tidak konsisten dengan teori ekonomi karena jika penduduk di pemerintah kota menerima hibah, tanpa disertai perubahan pajak, hibah tersebut harus setara dengan peningkatan pendapatan. Ini berarti bahwa penduduk di pemerintah daerah harus membelanjakan peningkatan pendapatan ini dengan cara yang sama seperti peningkatan pendapatan lainnya (Hines Jr & Thaler, 1995).

Beberapa penelitian telah menganalisis dampak aktual pada pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh berbagai jenis hibah dan sebagian besar cenderung mendukung adanya *flypaper effect*, yaitu pengeluaran dirangsang jauh lebih banyak daripada yang diprediksi oleh teori ekonomi. Untuk hibah yang didapat tanpa batasan, perkiraan dampak peningkatan hibah dapat mencapai 100 persen daripada 5 hingga 10 persen (Hines Jr & Thaler, 1995).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Data pada penelitian ini merupakan data panel. Data panel pada penelitian ini menggunakan data Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Belanja Daerah pada lima Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun 2013-2023. Lima kabupaten/kota ini terdiri dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan

(TTS), Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang. Kabupaten/Kota yang dipilih berdasarkan nilai Belanja Daerah terbesar di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode dan Alat Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Analisis Regresi data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Gujarati, 2021).

Analisis terhadap analisis regresi data panel pada umumnya menggunakan tiga pendekatan analisis, yaitu *Random Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Common Effect Model*. Pada pengujian mengenai pemilihan model terbaik dari tiga model yang berbeda yaitu *Random Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Common Effect Model* sampai pada pengujian statistik ini menggunakan alat analisis statistik yaitu STATA 17.

Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$BD_t = \beta_0 + \beta_1 DP_t + \beta_2 PAD_t + e_t \quad (1)$$

Dimana,

BD_t = Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTT

DP_t = Dana Perimbangan yang diterima

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Variabel Independen

e_t = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Hasil analisis menggunakan regresi data panel adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM)

corr(u_i, Xb) = -0.3963		F(2,48) = 147.06	Prob > F = 0.0000		
Belanja	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
DanaPerimbangan	1.193955	.0710761	16.80	0.000	1.051047 1.336863
PAD	-.0890681	.0658636	-1.35	0.183	-.2214958 .0433597
_cons	20.86826	64.13096	0.33	0.746	-108.0757 149.8122
sigma_u	66.464137				
sigma_e	89.879289				
rho	.3535182	(fraction of variance due to u_i)			
F test that all u_i=0: F(4, 48) = 4.97		Prob > F = 0.0020			

Hasil pengujian FEM di atas menunjukkan hasil analisis menggunakan Uji Chow. Hasil pengujian

Chow menunjukkan Probabilitas $F < \alpha$ (5%) sehingga menyimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Analisis selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian Hausman pada *Random Effect Model* (REM). Berikut adalah tabel *outcome* dari *Random Effect Model* (REM).

Tabel 2. Hasil pengujian *Random Effect Model* (REM)

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fe	(B) re		
DanaPerimb~n	1.193955	1.134889	.0590661	.0175501
PAD	-.0890681	-.067722	-.021346	.

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

```
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
        = 9.40
Prob > chi2 = 0.0091
(V_b-V_B is not positive definite)
```

Hasil pengujian REM di atas menunjukkan hasil analisis menggunakan Uji Hausman. Hasil pengujian Hausman menunjukkan Probabilitas Chi Square $< \alpha$ (5%) sehingga menyimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Selanjutnya akan dilakukan pengujian *Common Effect Model* (CEM) menggunakan pengujian *Lagrange Multiplier* (LM) untuk melihat pemilihan model terbaik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian dari *Common Effect Model* adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil pengujian *Common Effect Model*

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$\text{Belanja}[\text{Daerah}, t] = Xb + u[\text{Daerah}] + e[\text{Daerah}, t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
Belanja	61304.29	247.597
e	8078.287	89.87929
u	1094.042	33.0763

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 8.25
Prob > chibar2 = 0.0020

Hasil pengujian CEM di atas menunjukkan hasil analisis menggunakan Uji LM. Hasil pengujian LM menunjukkan Probabilitas Chibar square $< \alpha$ (5%) sehingga menyimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan pada dua pengujian menggunakan uji Chow dan uji Hausman model

yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka pemilihan terhadap model terbaik adalah pada *Fixed Effect Model*.

Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik terdiri dari tiga pengujian yang berbeda yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas
. vif, uncentered

Variable	VIF	1/VIF
DanaPerimb~n	1.55	0.646640
PAD	1.55	0.646640
Mean VIF	1.55	

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas pada model yang dianalisis.

Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan *Wald Test*.

Tabel 5. Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (5) = 615.90
Prob>chi2 = 0.0000

Hasil pengujian heeterokedastisitas menggunakan wald test menunjukkan nilai Probabilitas Chi Square < α (5%) sehingga disimpulkan terdapat heterokedastisitas pada model yang dianalisis.

Pengujian selanjutnya adalah melakukan pengujian autokorelasi menggunakan *Breusch Pagan LM Test*.

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Correlation matrix of residuals:

	__e1	__e2	__e3	__e4	__e5
__e1	84273.09				
__e2	40643.96	28960.73			
__e3	26241.45	23742.83	149607.8		
__e4	1746.557	-6808.598	72141.72	114507.3	
__e5	5365.297	6274.92	19366.87	20524.58	10408.82

__e1	__e2	__e3	__e4	__e5
1.0000				
0.8227	1.0000			
0.2337	0.3607	1.0000		
0.0178	-0.1182	0.5512	1.0000	
0.1812	0.3614	0.4908	0.5945	1.0000

Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(10) = 21.311, Pr = 0.0190
Based on 11 complete observations over panel units

Hasil pengujian autokorelasi menggunakan *Breusch Pagan LM Test* menunjukkan nilai Probabilitas Chi Square < α (5%) sehingga menunjukkan bahwa model yang dianalisis terdapat autokorelasi. Dikarenakan model yang dianalisis menunjukkan terdapat heterokedastisitas dan autokorelasi maka perlu untuk dihilangkan faktor heterokedastisitas dan autokorelasi. Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan *robustness* terhadap *standard error* dari *Fixed Effect Model* (FEM) yang sebelumnya dipilih menjadi model terbaik. Berikut adalah hasil *robustness check* dari *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 7. *Robustness Check* untuk Mengatasi Heterokedastisitas

corr(u_i, Xb) = -0.3963 F(2,4) = 69.62
Prob > F = 0.0008

(Std. err. adjusted for 5 clusters in Daerah)

Belanja	Robust				
	Coefficient	std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
DanaPerimbangan	1.193955	.1012271	11.79	0.000	.9129033 1.475006
PAD	-.0890681	.0408359	-2.18	0.095	-.2024468 .0243107
_cons	20.86826	91.33754	0.23	0.830	-232.7254 274.4619
sigma_u	66.464137				
sigma_e	89.879289				
rho	.3535182				(fraction of variance due to u_i)

Hasil pengujian *robustness* terhadap *standard error* dari *Fixed Effect Model* (FEM) mempengaruhi besaran nilai *standard error* yang kemudian menghilangkan faktor *bias* dalam model yang dianalisis sehingga dapat disimpulkan faktor heterokedastisitas sudah dihilangkan.

Tabel 8. Pengujian FGLS *Regression* untuk Heterokedastisitas dan Autokorelasi

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares
 Panels: homoskedastic
 Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1 Number of obs = 55
 Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 5
 Estimated coefficients = 7 Time periods = 11
 Wald chi2(6) = 414.56
 Log likelihood = -321.7137 Prob > chi2 = 0.0000

Belanja	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
DanaPerimbangan	1.193955	.0663992	17.98	0.000	1.063815 1.324095
PAD	-.0890681	.0615297	-1.45	0.148	-.2096641 .031528
Daerah					
2	-25.39324	37.56611	-0.68	0.499	-99.02146 48.23498
3	-20.63881	36.29211	-0.57	0.570	-91.77002 50.49241
4	61.17919	37.31463	1.64	0.101	-11.95614 134.3145
5	130.838	37.95665	3.45	0.001	56.44437 205.2317
_cons	-8.328771	67.26324	-0.12	0.901	-140.1623 123.5048

Pengujian di atas adalah untuk memperbaiki model yang masih terdapat autokorelasi namun mampu menyembuhkan faktor heterokedastisitas dan autokorelasi secara bersamaan, pengujian tersebut dinamakan *Generalized Least Square* menggunakan *Cross-Sectional Time-Series Feasible Generalized Least Squares (FGLS) Regression..* Hasil pengujian di atas menunjukkan secara *panels* sudah tidak terdapat heterokedastisitas dan secara *correlation* sudah tidak terdapat autokorelasi, sehingga menunjukkan bahwa model yang dianalisis sudah lolos dari pengujian asumsi klasik sehingga bisa untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Tabel *Outcome* Regresi Data Panel Menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 55
 Group variable: Daerah Number of groups = 5

R-squared: Obs per group: min = 11
 Within = 0.8597 avg = 11.0
 Between = 0.8338 max = 11
 Overall = 0.8334

corr(u_i, Xb) = -0.3963 F(2,4) = 69.62
 Prob > F = 0.0008

(Std. err. adjusted for 5 clusters in Daerah)

Belanja	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
DanaPerimbangan	1.193955	.1012271	11.79	0.000	.9129033 1.475006
PAD	-.0890681	.0408359	-2.18	0.095	-.2024468 .0243107
_cons	20.86826	91.33754	0.23	0.830	-232.7254 274.4615
sigma_u	66.464137				
sigma_e	89.879289				
rho	.3535182	(fraction of variance due to u_i)			

Interpretasi terhadap variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 1,193 dan memiliki arah hubungan yang sifatnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila Dana Perimbangan naik sebesar 1 satuan maka Belanja Daerah Pemerintah kabupaten/kota akan naik sebesar 1,193 poin Nilai koefisien variabel PAD menunjukkan arah hubungan yang negatif yaitu -0,089 artinya apabila PAD pemerintah naik sebesar 1 satuan maka variabel Belanja Pemerintah akan turun sebesar 0,089 poin. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tasri, 2018); (Trisyanti & Saputra, 2022).

Pengujian secara parsial menggunakan uji *t statistic* menunjukkan nilai probabilitas *t statistic* pada variabel Dana Perimbangan dan PAD masing-masing sebesar 0,000 dan 0,095 artinya hanya variabel Dana Perimbangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dikarenakan nilai Probabilitas *t statistic* < *alpha* (5%) namun sebaliknya pada variabel PAD yaitu nilai Probabilitas *t statistic* > *alpha* (5%) yang menyimpulkan variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Pengujian secara simultan menggunakan uji *f statistic* menunjukkan nilai probabilitas *f statistic* adalah sebesar 0,0008 artinya secara bersama-sama variabel independen Dana Perimbangan dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Nilai koefisien determinasi (*R square*) pada analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* menunjukkan nilai *Overall* pada tabel *outcome* adalah sebesar 0,8334 atau 83,34% artinya variasi perubahan variabel Belanja Daerah mampu dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan dan PAD sebesar 83,34% sisanya yaitu 16,66% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang dianalisis.

Analisis Flypaper Effect

Analisis terhadap gejala flypaper effect dilakukan berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Tresch (2002) pada bukunya yang berjudul *Finance Public Anormative Theory*. Analisis yang dilakukan tersebut menjelaskan bahwa secara analisis pengeluaran per kapita ditentukan oleh hbah yang diterima individu oleh pemerintah dan pendapatan dari individu pada daerah tersebut. Kriteria terhadap *flypaper effect* terjadi apabila nilai koefisien variabel dari Dana Perimbangan lebih besar dari koefisien variabel dari PAD. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel Dana Perimbangan yaitu 1,193 > -0,089 yang merupakan koefisien dari variabel PAD sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya *flypaper effect* pada

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fenomena *flypaper effect* yang terjadi berdasarkan kesimpulan analisis tabel *outcome* di atas menunjukkan bahwa peran Dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah dalam membiayai Belanja Daerah pemerintah. Pada hal ini bisa disimpulkan bahwa fungsi Dana Perimbangan salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) menimbulkan kemunduran desentralisasi fiskal atau kemalasan fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nanga (2005) yang menjelaskan bahwa pemberian DAU menyebabkan kinerja daerah menjadi kurang kreatif dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menimbulkan kemalasan fiskal. Sehingga fungsi dan tujuan adanya desentralisasi fiskal justru menyebabkan kemunduran secara desentralisasi fiskal akibat kurang kreatifnya daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa secara statistik variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah namun tidak berlaku untuk variabel PAD.

Secara analisis eksistensi *flypaper effect* di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpulkan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* yang dilihat berdasarkan nilai koefisien variabel Dana Perimbangan yang lebih besar dari pada nilai koefisien PAD. Sehingga berdasarkan analisis ini disimpulkan terdapat kemunduran desentralisasi fiskal apabila penggunaan terhadap Dana Perimbangan salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) masih digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja daerah oleh Pemerintah Daerah.

Saran

Penelitian selanjutnya bisa memperhitungkan gejala Ilusi Fiskal menggunakan variabel yang dianalisis pada penelitian ini untuk melihat bias informasi pada penggunaan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik, K. (2022). Examining flypaper effect in Indonesia: Evidence after transferring urban-rural land and building tax to locals government. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478.
- Baekgaard, M., & Kjaergaard, M. (2016). Intergovernmental grants and public expenditures: Evidence from a survey experiment. *Local Government Studies*, 42(2), 189–207.
- Fedelino, A. (2010). *1 Fiscal Decentralization: Key Issues*. International Monetary Fund. <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589069855/ch001.xml>
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications.
- Hapsoro, D., & Yoduke, R. (2019). Fiscal illusion detection and their effect on economic growth in Sulawesi. *Jurnal Economia*, 15(2), 172–188.
- Hines Jr, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226.
- Inman, R. P. (2008). *The flypaper effect*. National Bureau of Economic Research.
- Khairy, R. N. (2024). DAMPAK FLYPAPER EFFECT TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KOMPARASI KOTA DENGAN KABUPATEN). *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 3(1).
- Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 213–226.
- Kjaergaard, M. (2015). The flypaper effect: Do political institutions affect Danish local governments' response to intergovernmental grants? *Local Government Studies*, 41(4), 534–552.
- Korzheneych, A., & Langer, S. (2016). *The Flypaper Effect in Germany: An East-West Comparison*. CEPIE Working Paper.
- Nanga, M. (2005). Analisis posisi fiskal

- kabupaten/kota di NTT: Adakah posisi fiskal pasca Otda lebih baik. *Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.*
- Parajuli. (2023). *Does the Flypaper Effect Exist in Developing Countries?* 서울대학교 대학원.
- Pettersson, K. (2020). *The flypaper effect: A study of the flypaper effect in Swedish municipalities.*
- Rahmatillah, Marzuki, Ghazali Syamni, N. (n.d.). *View of ANALYSIS OF THE FLYPAPER EFFECT AND ITS INFLUENCE ON DISTRICT/CITY REGIONAL EXPENDITURES IN ACEH PROVINCE 2016-2021.* Retrieved September 16, 2024, from <https://jaruda.org/index.php/go/article/view/45/31>
- Sour, L. (2013). The flypaper effect in Mexican local governments. *Estudios Económicos*, 165–186.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Swasito, A. P. (2021). Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada kebijakan belanja pemerintah daerah? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 72–80.
- Tasri, A. (2018). The flypaper effect phenomenon: Evidence from Indonesia. *European Journal of Engineering and Formal Sciences*, 2(1), 20–24.
- Tresch, R. (2002). Finance public Anormative theory. *Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.*
- Trisyanti, D. I., & Saputra, P. M. A. (2022). ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PAD DAN DAU TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KIB DAN KIT. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(4), 646–657.

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ACTIVITY BASED COSTING* (ABC)
DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI
PADA DIAN JATI MEBEL**

Maria Avila Ndese

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
avhila25@gmail.com

Minarni A. Dethan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
minarni.dethan@staf.undana.ac.id

Nikson Tameno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
niksontameno@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan harga pokok produksi di Dian Jati Mebel berdasarkan metode *Activity Based Costing*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data keuangan yang diperoleh dari perusahaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* untuk menghitung biaya produksi pada Dian Jati Mebel. Berdasarkan hasil penelitian, Mabel Dian Jati masih menggunakan metode konvensional dalam menentukan biaya produksi. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penetapan biaya berbasis aktivitas untuk mendukung pengambilan keputusan Dian Jati Mebel dan membantu menentukan biaya produksi secara akurat.

Kata kunci: Activity Based Costing dan Harga Pokok Produksi

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the cost of production at Dian Jati Mebel based on the Activity Based Costing method. Data collection techniques used in this research include observation, interviews and documentation methods. The data analysis method used in this research is a quantitative descriptive method. Quantitative descriptive analysis techniques are carried out by analyzing financial data obtained from the company. Data analysis was carried out using the Activity Based Costing method to calculate production costs. Based on research results, Mabel Dian Jati still uses traditional methods in determining production costs. Therefore, an activity-based costing method is needed to support Dian Jati Mebel's decision making and help determine production costs accurately.

Keywords: Activity Based Costing and Cost of Goods Production

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menyebabkan ketatnya persaingan antar pelaku usaha di sektor perdagangan, Industri, dan jasa di era modern. Setiap pelaku usaha dituntut untuk lebih agresif dan inventif agar bisa sukses di pasar karena jumlahnya yang banyak dan persaingan yang ketat. Sangat penting bagi pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk mereka dan menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai dan terjangkau (Ismayeni, dkk 2020).

Pelaku bisnis juga memerlukan rencana yang matang untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Tujuan perusahaan adalah untuk secara konsisten meningkatkan kualitas produksinya dengan memanfaatkan metode produksi yang sesuai. Produsen terbiasa memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar serta menggunakan tenaga kerja dan mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memenuhi permintaan konsumen. Biaya merupakan faktor terpenting yang harus dikorbankan agar bisnis perusahaan berjalan lancar demi mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuan utama bisnis perusahaan. Besar kecilnya laba seringkali dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan yang memproduksi berbagai produk perlu menentukan biaya produksi secara akurat dengan menggunakan metode yang sesuai dengan situasi (Arlita, dkk 2021).

Penentuan biaya produksi yang tepat merupakan faktor terpenting dalam menjaga kelangsungan usaha. Rasya, dkk (2021:197) menjelaskan bahwa Biaya produksi juga menjadi acuan dalam menentukan harga jual suatu produk. Oleh karena itu, sebelum menentukan harga jual, harus ditentukan harga pokok produksinya. Untuk menghindari masalah yang timbul pada proses penetapan harga produk, maka harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan perlu lebih serius dalam menentukan titik biaya produksi. Namun banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan cara tradisional dalam menghitung biaya produksi untuk menentukan harga jual barang jadi.

Dian Jati Mebel merupakan salah satu usaha mikro kecil yang berlokasi di Jl. Fatutuan, Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Dian Jati Mebel tidak menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas dan Metode perhitungan tradisional masih digunakan untuk menentukan biaya produksi. Penetapan biaya tradisional adalah penetapan biaya produk, dimana biaya dialokasikan berdasarkan biaya bahan baku langsung produk dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* dihitung berdasarkan faktor aktivitas. Faktor aktivitas merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya serta perubahan jumlah unit yang diproduksi. Dian Jati Mebel masih menggunakan cara tradisional dalam menghitung biaya produk atau produksi, yaitu menghitung biaya *overhead* berdasarkan satuan produksi atau output.

Salah satu cara untuk meningkatkan informasi biaya dibandingkan sistem tradisional adalah dengan menggunakan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah sistem informasi biaya yang dirancang untuk memberikan informasi lengkap tentang aktivitas sehingga personel perusahaan dapat mengolahnya (Mulyadi, 2014:40). Dalam metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas ini, pembagian biaya atas biaya Produksi adalah penjumlahan biaya-biaya dari seluruh kegiatan yang dapat menghasilkan suatu barang/jasa yang menjadi harga jual produk tersebut. Metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas ini menggunakan berbagai jenis penggerak biaya untuk mengukur sumber daya yang dikonsumsi suatu produk dengan lebih akurat.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis implementasi *Activity Based Costing* (ABC) Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Pada Dian Jati Mebel”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkorelasikan hasil perhitungan *Activity Based Costing* dengan metode tradisional agar dapat mengetahui valid atau tidaknya hasil yang diperoleh.

KAJIAN TEORI

Teori Terapan (*Applied Theory*)

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah teori terapan. Teori terapan adalah teori yang terletak pada tataran mikro dan dapat diterapkan pada konseptualisasi (Dougherty & Pfaltzgraff, 1990: 10-11). Teori terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya-volume-manfaat.

Menganalisis hubungan antara biaya, kuantitas, dan keuntungan merupakan elemen kunci dalam berbagai keputusan bisnis, antara lain seperti pemilihan jenis atau kelompok produk, strategi pemasaran. Pemilihan jenis atau kelompok produk, strategi pemasaran, dan penggunaan alat produksi. Konsep analisis hubungan biaya-volume-manfaat telah meresap ke dalam bidang manajemen karena berkaitan dengan bagaimana manajer melaksanakan tugas mereka. Konsep ini memiliki keuntungan besar dan berfungsi sebagai alat manajemen yang penting untuk menemukan potensi keuntungan suatu perusahaan yang belum dimanfaatkan (Belmo & Neno, 2020 : 286).

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menggunakan *Applied Theory* sebagai salah satu *Grand Theory* dalam penelitian ini, dengan menghubungkan biaya, volume, dan laba pada objek penelitian yang dimana dari ketiganya dapat membantu peneliti dan pihak Dian Jati Mebel menggunakan Penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk menentukan biaya produksi. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas memungkinkan perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang menaikkan biaya produksi, mengalokasikan biaya ke seluruh produk dengan lebih akurat, dan menetapkan biaya produksi yang lebih sesuai dengan struktur biaya sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan penetapan harga yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja keuangan.

Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah disiplin akuntansi yang bertujuan untuk melacak, mencatat, dan menganalisis biaya yang terkait dengan aktivitas produksi barang dan jasa suatu perusahaan. Menurut mursyidi, (2008) akuntansi biaya melibatkan pencatatan,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan biaya produksi dan penjualan produk dan jasa dengan cara tertentu dan menafsirkan hasilnya.

Harga Pokok Produksi (HPP)

Biaya produksi merupakan salah satu item yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang. Penentuan harga suatu produk secara akurat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Biaya produksi menunjukkan total harga pokok barang yang diselesaikan pada periode berjalan. Biaya yang dibebankan pada produk jadi hanyalah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead (Hansen dan Mowen 2009 : 60).

Sistem Akuntansi Biaya Tradisional

Sistem akuntansi tradisional berasumsi bahwa produk dan hasil yang saling terkait adalah penyebab biaya. Dengan kata lain, sistem akuntansi biaya tradisional menempatkan produk individual sebagai pusat sistem biaya. Sistem akuntansi tradisional mengklasifikasikan biaya menjadi biaya langsung dan tidak langsung dan mengalokasikan biaya berdasarkan volume produksi, jam tenaga kerja langsung, atau jam mesin. Efendi (2023: 55) menjelaskan bahwa Metode tradisional merupakan sistem yang berdasarkan jumlah unit yang diproduksi untuk perhitungannya.

Activity Based Costing (ABC)

Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas adalah sistem untuk meningkatkan informasi biaya dari sistem tradisional. *Activity Based Costing* merupakan sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengolahan terhadap aktivitas (Mulyadi, 2014:40).

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian yaitu studi kasus. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode deskripsi kuantitatif menganalisis data keuangan yang diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan perusahaan, dan penulis menghitung dan menganalisis biaya produksi berdasarkan metode *Activity Based Costing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghitung biaya produksi dengan cara tradisional

a) Menghitung bahan baku

Berikut adalah tabel perhitungan bahan baku Dian Jati Mebel tahun 2023.

Tabel 1. Perhitungan bahan baku

Produk	Kebutuhan Bahan Baku	Harga	Jumlah
Lemari	2.533	Rp40.000	Rp101.320.000
Pintu	4.500	Rp40.000	Rp180.000.000
Jendela	1.698	Rp40.000	Rp67.920.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

b) Perhitungan upah Tenaga Kerja Langsung (BTKL)

Di bawah adalah tabel perhitungan upah tenaga kerja langsung Dian Jati Mebel tahun 2023.

Tabel 2. Perhitungan upah Tenaga Kerja Langsung Tahun 2023

No	Bagian	Jumlah TKL	Upah/bulan	Jumlah upah TKL Tahun 2023
1	Bagian Produksi	3 orang	Rp7.500.000	Rp90.000.000
2	Bagian Pemasangan	1 orang	Rp1.200.000	Rp14.400.000
3	Bagian <i>Finishing</i>	1 orang	Rp2.000.000	Rp24.000.000
	Jumlah	5 orang	Rp10.700.000	Rp145.200.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

c) Perhitungan Biaya *Overhead* Pabrik (BOP)
Biaya *overhead* pabrik seluruh produk sebesar Rp76.740.000

$$\begin{aligned} \text{BOP} &= \frac{\text{Biaya Overhead dianggarkan}}{\text{Jumlah Produksi}} \\ &= \frac{\text{Rp76.740.000}}{1.498} \\ &= \text{Rp51.228} \end{aligned}$$

Berikut untuk penentuan tarif BOP:

Tabel 3. Penentuan tarif BOP

Produk	BOP	Jumlah Produk	Jumlah
Lemari	Rp51.228	149	Rp7.633.017
Pintu	Rp51.228	500	Rp25.614.152
Jendela	Rp51.228	849	Rp43.492.830

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Biaya *overhead* pabrik per lemari adalah sebesar Rp7.633.017, sedangkan biaya *overhead* per pintu sebesar Rp25.614.152, dan biaya *overhead* per jendela sebesar Rp43.492.830. Berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan, maka biaya produksi per produk dengan sistem akuntansi tradisional yaitu:

Tabel 4. Perhitungan biaya produksi dengan cara tradisional

Jenis Biaya	Lemari	Pintu	Jendela
Biaya bahan baku	Rp101.320.000	Rp180.000.000	Rp67.920.000
BTKL	Rp145.200.000	Rp145.200.000	Rp145.200.000
BOP	Rp7.633.017	Rp25.614.152	Rp43.492.830
Jumlah produk yang diproduksi	149	500	849
Biaya produksi per produk	Rp1.705.725	Rp701.628	Rp302.253

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Harga dasar produksi lemari per produk dengan menggunakan metode tradisional sebesar Rp1.705.725 yaitu dengan pemakaian BBB sebesar Rp101.320.000, BTKL sebesar Rp145.000.000, BOP sebesar Rp7.633.017, sedangkan harga pintu per produk sebesar Rp701.628 yaitu dengan pemakaian BBB sebesar Rp180.000.000, BTKL sebesar Rp145.000.000, BOP sebesar Rp25.614.152, dan untuk harga jendela per produknya sebesar Rp302.253 yaitu dengan pemakaian BBB sebesar Rp67.920.000, BTKL sebesar Rp145.200.000, BOP sebesar Rp43.492.830.

Menghitung HPP berdasarkan sistem ABC

a) BBB

Elemen biaya yang pertama adalah BBB, biaya bahan baku yang digunakan selama proses produksi Dian Jati Mebel pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan BBB

Produk	Kebutuhan BBB	Harga/lembar	Jumlah
Lemari	2.533	Rp40.000	Rp101.320.000
Pintu	4.500	Rp40.000	Rp180.000.000
Jendela	1.698	Rp40.000	Rp67.920.000
Jumlah			Rp349.240.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Harga kayu per lembar pada tahun 2023 yaitu: Rp40.000. Jumlah atau total penggunaan bahan baku kayu selama pada tahun 2023 yaitu 2.533 untuk produk lemari, 4.500 untuk produk pintu, dan 1.698 untuk produk jendela, dengan demikian total BBB yang dikeluarkan pada tahun 2023 senilai Rp349.240.000.

b) BTKL

Komponen yang kedua adalah biaya tenaga kerja atau upah langsung pada Dian Jati Mebel. Biaya tenaga kerja merupakan BTKL yang terlibat dalam pembuatan suatu produk. BTKL pada Dian Jati Mebel pada tahun 2023 sebesar Rp145.200.000, untuk 5 orang tergantung bagiannya masing-masing.

Tabel 5. BTKL Dian Jati Mebel Tahun 2023

Bagian	Jumlah Tenaga Kerja	Upah/ bulan	Jumlah BTKL Tahun 2023
Bagian Produksi	3 orang	Rp7.500.000	Rp90.000.000
Bagian Pemasangan	1 orang	Rp1.200.000	Rp14.400.000
Bagian Finishing	1 orang	Rp2.000.000	Rp24.000.000
Jumlah	5 orang	Rp10.700.000	Rp145.200.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

c) Biaya *Overhead* Pabrik (BOP)

Komponen besar yang ketiga adalah BOP. Biaya-biaya yang termasuk dalam BOP merupakan biaya-biaya yang tidak mempengaruhi secara langsung penentuan biaya produksi. Biaya ini timbul dari kegiatan yang terlibat dalam pembuatan suatu produk, dimulai dari pengolahan bahan mentah hingga bahan siap pakai. Penentuan biaya produksi dengan menggunakan sistem biaya berdasarkan aktivitas yang terdiri dari dua Langkah. Langkah pertama dalam menentukan biaya produksi suatu barang dengan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas adalah melacak produk. Biaya sumber daya untuk aktivitas yang mengonsumsinya, Langkah ini terdiri dari :

a) Analisis Kegiatan

Kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan suatu produk adalah:

1. kegiatan pemotongan
2. kegiatan perakitan
3. kegiatan *finishing*

b) Alokasi biaya pada kegiatan

Tabel 6. BOP pada tahun 2023

No	Jenis Biaya	Biaya (dalam Rupiah)	Total biaya tahun 2023 (dalam Rupiah)
1	Biaya penolong		
	a) Cermin	100.000	1.200.000
	b) Kunci	45.000	540.000
	c) Tarikan	15.000	180.000
	d) Lem	15.000	180.000
	e) Paku	15.000	180.000
	f) Skrup	15.000	180.000
	g) Kertas pasir	300.000	3.600.000
	h) Cat <i>woodstain water based</i>	75.000	900.000
	i) Kaca	50.000	600.000
	j) Tripleks		
2	Biaya makan karyawan	1.200.00	14.400.000
3	Biaya air minum	1.200.00	14.400.000
4	Biaya pemeliharaan mesin	250.000	3.000.000
5	Biaya Listrik	250.000	3.000.000
6	Biaya <i>Marketing</i>	1.200.00	14.400.000
7	Biaya perlengkapan material	1.500.00	16.800.000
8	Transportasi	50.000	600.000
9	Biaya pemeliharaan bangunan	200.000	2.400.000
Jumlah			Rp76.740.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

- c) Kegiatan serupa dikelompokkan ke dalam kelompok serupa
- d) Kegiatan kelompok serupa yang berkaitan dengan produksi produk adalah:
- 1) Kelompok kegiatan pemotongan : biaya listrik, makan, air minum, perlengkapan material, serta pemeliharaan mesin

- 2) Kelompok kegiatan perakitan : biaya bahan penolong, dan biaya pemeliharaan bangunan
- 3) Kelompok kegiatan *finishing*: biaya bahan penolong yaitu *cat woodstain water based*

Tabel 7. Biaya kelompok kegiatan serupa Tahun 2023

No	Kegiatan	Jenis biaya	Jumlah
1	Pemotongan	Biaya Listrik	Rp3.000.000
		Biaya makan	Rp14.400.000
		Biaya air minum	Rp14.400.000
		Biaya Perlengkapan Material	Rp16.800.000
		Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp3.000.000
Jumlah			Rp51.600.000
2	Perakitan	Biaya bahan penolong	1.200.000
		1. Cermin	540.000
		2. Kunci	180.000
		3. Tarikan	180.000
		4. Lem	180.000
		5. Paku	180.000
		6. Sekrup	180.000
		7. Kertas pasir	900.000
		8. Kaca	600.000
		9. Tripleks	Rp2.400.000
		Biaya Pemeliharaan Bangunan	
Jumlah			Rp6.540.000
3	<i>Finishing</i>	Biaya bahan penolong: Cat <i>woodstain water based</i>	Rp3.600.000
Jumlah			Rp3.600.000
4	Pemasaran /Marketing	Biaya Marketing	Rp14.400.000
		Biaya Transportasi	Rp600.000
Jumlah			Rp15.000.000

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

e) Perhitungan kelompok BOP, Perhitungan BOP untuk penentuan biaya pokok produk lemari, pintu, serta jendela dapat dilakukan;

1) Kegiatan pemotongan

Yang termasuk dalam kelompok kegiatan pemotongan adalah biaya Listrik, makan, minum, perlengkapan material, dan pemeliharaan mesin. Penentuan tarif kelompok (*pool rate*) berdasarkan jumlah biaya bahan baku yang dipakai selama tahun 2023. Jumlah bahan baku yang dipakai selama tahun 2023 adalah 8.731 lembar kayu.

Kelompok aktivitas pemotongan = $\frac{\text{Rp}51.600.000}{8.731 \text{ kayu}}$

=Rp5.910/lembar kayu

2) Kegiatan perakitan

Yang termasuk dalam kelompok perakitan yaitu Biaya bahan pembantu seperti cermin, kunci, tarikan, lem, paku, sekrup, kertas pasir, kaca, tripleks dan biaya pemeliharaan bangunan. Tentukan tarif kelompok (*pool rate*) berdasarkan total biaya bahan baku yang digunakan pada tahun 2023. Penggunaan bahan baku pada tahun 2023 adalah 8.731 lembar kayu.

Kelompok aktivitas perakitan = $\frac{\text{Rp}6.540.000}{8.731}$

=Rp749/lembar kayu

3) Kegiatan *Finishing*

Yang termasuk dalam kelompok kegiatan *Finishing* adalah Biaya bahan penolong seperti Cat *woodstain water based*. Penetapan tarif kelompok (*pool rate*) didasarkan pada total BBB yang digunakan pada tahun 2023. Jumlah bahan baku yang dipakai selama tahun 2023 adalah 8.731 lembar kayu.

Kelompok aktivitas *Finishing* = $\frac{\text{Rp}3.600.000}{8.731}$

=Rp412/lembar kayu

4) Kegiatan Pemasaran

Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk menjual hasil produksi kepada konsumen. Tentukan tarif kelompok (*pool rate*) berdasarkan total BBB yang digunakan pada tahun 2023. Jumlah BBB yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp15.000.000

Kelompok aktivitas pemasaran = $\frac{\text{Rp}15.000.000}{8.731}$

=Rp1.718/lembar kayu

2) Langkah kedua

BOP untuk setiap kelompok aktivitas ditetapkan ke jenis produk yang berbeda menggunakan tarif kelompok (*pool rate*) yang digunakan untuk setiap produk. BOP dapat dihitung dengan cara:

BOP Dibebankan = Tarif kelompok x Unit *cost driver* yang dikonsumsi

a) Kegiatan pemotongan

Kegiatan pemotongan adalah proses pemotongan kayu dengan menggunakan mesin. Biaya yang termasuk dalam kelompok pemotongan adalah biaya listrik, makan, minum, perlengkapan material, dan pemeliharaan mesin. alokasi biaya ke *cost driver* didasarkan pada penggunaan bahan baku kayu sebesar 2.533 untuk lemari, 4.500 untuk pintu, dan 1.698 untuk jendela, karena penggunaan bahan baku memicu biaya tersebut. Biaya yang digunakan pada kegiatan pemotongan sebesar Rp14.970.030 untuk lemari, Rp26.595.000 untuk pintu, dan Rp10.035.180 untuk jendela.

Tabel 8. Alokasi biaya Kegiatan pemotongan

Produk	Tarif Kelompok	Cost Driver	Jumlah
Lemari	Rp5.910	2.533	Rp14.970.030
Pintu	Rp5.910	4.500	Rp26.595.000
Jendela	Rp5.910	1.698	Rp10.035.180

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

b) Kegiatan Perakitan

Kegiatan perakitan adalah proses merakit berbagai macam komponen yang telah di potong. Biaya kelompok kegiatan pemasangan meliputi biaya bahan pembantu seperti cermin, kunci, tarikan, lem, paku, sekrup, kertas pasir, kaca dan tripleks. Alokasi pada faktor biaya ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan lemari 2.533, pemakaian bahan baku pintu 4.500, dan pemakaian bahan baku jendela 1.698. Biaya yang digunakan pada aktivitas perakitan sebesar Rp1.897.357 untuk lemari, Rp3.370.748 untuk pintu, dan Rp1.271.896 untuk jendela.

Tabel 9. Alokasi biaya kegiatan perakitan

Produk	Tarif Kelompok	Cost Driver	Jumlah
Lemari	Rp749	2.533	Rp1.897.357
Pintu	Rp749	4.500	Rp3.370.748
Jendela	Rp749	1.698	Rp1.271.896

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

c) Kegiatan *finishing*

Kegiatan *finishing* bertanggung jawab dalam memberikan sentuhan akhir pada produk yang sudah dirakit seperti pengamplasan, pengisian celah atau retakan kecil, membersihkan permukaan dari debu atau kotosan, memberikan warna pada produk kemudian melakukan pengeringan. Biaya yang termasuk dalam kelompok kegiatan *Finishing* meliputi Biaya bahan penolong seperti Cat *woodstain water based*. Alokasi pada faktor biaya dilakukan berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan produk lemari 2.533, pemakaian bahan baku pintu 4.500, dan untuk pemakaian bahan baku jendela 1.698. Biaya yang digunakan pada aktivitas *finishing* sebesar Rp1.043.596 untuk produk lemari, Rp1.854.000 untuk produk pintu, dan Rp699.576 untuk produk jendela.

Tabel 10. Alokasi biaya kegiatan *finishing*

Produk	Tarif Kelompok	Cost Driver	Jumlah
Lemari	Rp412	2.533	Rp1.043.596
Pintu	Rp412	4.500	Rp1.854.000
Jendela	Rp412	1.698	Rp699.576

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

d) Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran bertanggungjawab untuk menjual hasil produksi kepada pelanggan. Alokasi pada faktor biaya ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan produk lemari 2.533, pemakaian bahan baku pintu 4.500, dan untuk pemakaian bahan baku jendela 1.698. Biaya yang digunakan pada aktivitas pemasaran sebesar Rp4.351.694 untuk produk lemari, Rp7.731.000 untuk produk pintu, dan Rp2.917.164 untuk produk jendela.

Tabel 11. Alokasi Biaya kegiatan Pemasaran

Produk	Tarif Kelompok	Cost Driver	Jumlah
Lemari	Rp1.718	2.533	Rp4.351.694
Pintu	Rp1.718	4.500	Rp7.731.000
Jendela	Rp1.718	1.698	Rp2.917.164

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Besarnya BOP dihitung dengan menggunakan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas “ABC”.

Tabel 12. Alokasi BOP

Kelompok	Lemari	Pintu	Jendela
Pemotongan	Rp14.970.030	Rp26.595.000	Rp10.035.180
Perakitan	Rp1.897.357	Rp3.370.748	Rp1.271.896
<i>Finishing</i>	Rp2.130.253	Rp3.784.500	Rp1.428.018
Pemasaran	Rp4.351.694	Rp7.731.000	Rp2.917.164
Jumlah	Rp23.349.334	Rp41.481.248	Rp15.652.258

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Total BOP yang dialokasikan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah Rp23.349.334 untuk lemari, Rp41.481.248 untuk pintu, dan Rp15.652.258 untuk produk jendela. Di bawah ini adalah perhitungan biaya produksi dengan menggunakan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas "ABC".

Tabel 13. Perhitungan Biaya Produksi dengan Sistem Penetapan Biaya Berdasarkan Aktivitas ABC

Biaya	Lemari (dalam Rupiah)	Pintu (dalam Rupiah)	Jendela (dalam Rupiah)
Biaya bahan baku	101.320.000	180.000.000	67.920.000
BTKL	145.200.000	145.200.000	145.200.000
BOP	23.349.334	41.481.248	15.652.258
Jumlah produk yang diproduksi	149	500	849
Biaya produksi per produk	1.811.204	733.362	269.461

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

- 3) Perbandingan Sistem Penetapan Biaya Produksi Dian Jati Mebel dan Sistem Penetapan Biaya Berdasarkan Aktivitas (ABC)

Penentuan biaya produksi dan biaya overhead pabrik antara sistem Dian Jati Mebel dengan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. Perbandingan Biaya Produksi Sistem Tradisional dan Sistem Penetapan Biaya Berdasarkan Aktivitas (ABC)

Biaya	Sistem Tradisional			Sistem ABC		
	Lemari	Pintu	Jendela	Lemari	Pintu	Jendela
Biaya bahan baku	Rp101.320.000	Rp180.000.000	Rp67.920.000	Rp101.320.000	Rp180.000.000	Rp67.920.000
BTKL	Rp145.200.000	Rp145.200.000	Rp145.200.000	Rp145.200.000	Rp145.200.000	Rp145.200.000
Biaya overhead pabrik	Rp47.633.017	Rp25.614.152	Rp43.492.830	Rp23.349.334	Rp41.481.248	Rp15.652.258
Jumlah produk yang dihasilkan	149	500	849	149	500	849
Biaya produksi per produk	Rp1.705.725	Rp701.628	Rp302.253	Rp1.801.204	Rp733.362	Rp269.461

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Tabel 14 menunjukkan biaya pembuatan lemari dengan menggunakan system Dian Jati Mebel lebih rendah daripada sistem *Activity Based Costing* yaitu Rp1.705.725 < Rp1.801.204, dan untuk biaya produksi pintu dengan sistem Dian Jati Mebel lebih rendah daripada system *Activity Based Costing* yaitu Rp701.628 < Rp733.362, sedangkan untuk biaya produksi jendela dengan sistem Dian Jati Mebel lebih tinggi daripada *Activity Based Costing* yaitu Rp302.253 > Rp269.461.

PEMBAHASAN

Perhitungan dengan sistem yang digunakan Dian Jati Mebel diperoleh biaya produksi masing-masing produk lemari sebesar Rp1.705.725, pintu sebesar Rp701.628, dan jendela sebesar Rp302.253. Menentukan biaya produksi berdasarkan Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas memerlukan dua Langkah : Langkah pertama dan Langkah kedua. Setelah dihitung biaya produksinya adalah Rp1.801.204 untuk lemari, Rp733.362

untuk pintu, dan Rp269.461 untuk jendela. Perbandingan biaya produksi antara sistem Dian Jati Mebel dengan sistem penetapan biaya berdasarkan (ABC) berdasarkan penelitian teoritis dan analisis data yang dilakukan. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas (ABC) memberikan hasil yang lebih baik untuk produk Lemari dan pintu. Di bawah ini adalah rincian perbandingan biaya produksi barang tersebut.

Tabel 15. Perbandingan biaya produksi

Jenis produk	Sistem Tradisional	Sistem ABC	Selisih
Lemari	Rp1.705.725	Rp1.801.204	Rp95.479
Pintu	Rp701.628	Rp733.362	Rp31.734
Jendela	Rp302.253	Rp269.461	Rp32.792

Sumber: Dian Jati Mebel, 2024

Berdasarkan table 15 terlihat bahwa biaya pembuatan lemari dan pintu dengan menggunakan sistem yang digunakan Dian Jati Mebel lebih rendah dibandingkan jika biaya produksi ditentukan dengan menggunakan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Perbedaan biaya produksi antara sistem yang digunakan Dian Jati Mebel dengan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas disebabkan oleh BOP yang dibebankan pada setiap produk. Metode digunakan Dian Jati Mebel, BOP hanya dibebankan pada satu faktor biaya, sementara pada metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas, BOP untuk setiap produk yang dibebankan pada aktivitas yang dilakukan dalam produksi produk tersebut akan dibebankan tergantung pada banyak faktor biaya. Karena itu, sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas dapat mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk dengan lebih akurat berdasarkan konsumsi setiap kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa hasil perhitungan biaya produksi dengan menggunakan sistem ABC lebih baik dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh Dian Jati Mebel. Sistem yang digunakan Dian Jati Mebel mudah digunakan karena hanya perlu menambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *overhead* pabrik, namun perhitungan ini tidak menghabiskan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, sehingga tidak cocok untuk

menghitung biaya produksi beberapa jenis produk.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penentuan biaya produksi dengan sistem Dian Jati Mebel dilakukan dengan menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead* pabrik dan membaginya dengan total produksinya. Hasil penentuan biaya produksi tahun 2023 untuk produk lemari per produk sebesar Rp1.705.725, sedangkan untuk produk pintu sebesar Rp701.628, dan untuk produk jendela sebesar Rp302.253.

Penentuan biaya produksi dengan menggunakan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas di Dian Jati dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama adalah menelusuri biaya sumber daya hingga aktivitas di mana sumber daya tersebut digunakan. Langkah ini terdiri dari menganalisis aktivitas, membebankan biaya pada aktivitas, mengelompokkan aktivitas serupa ke dalam kelompok serupa, dan menghitung biaya *overhead* kelompok. Langkah kedua yaitu menghitung tarif kelompok berdasarkan *cost driver*. Perhitungan biaya produksi per produk Rp1.801.204 untuk peoduk lemari, Rp733.362 untuk produk pintu, dan Rp269.461 untuk produk jendela.

Selisih biaya produksi antara sistem yang digunakan Dian Jati Mebel dengan sistem penetapan biaya berdasarkan kegiatan disebabkan oleh pembebanan BOP pada setiap produk. Pada sistem yang digunakan Dian Jati Mebel, biaya *overhead* pabrik hanya dibebankan pada satu faktor biaya, sedangkan pada sistem penetapan biaya berdasarkan kegiatan, biaya *overhead* pabrik untuk setiap produk yang dibebankan pada kegiatan yang dilakukan dalam produksi produk tersebut akan dibebankan tergantung pada banyak faktor biaya. Oleh karena itu, sistem penetapan biaya berbasis kegiatan menghitung biaya kegiatan berdasarkan konsumsi setiap kegiatan dan setiap produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Arita Suci, MD, Rahmadanni, MD, dan Putra, MD (2021). Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing Arief Gordyn Dalam Penetapan Harga Produksi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2, 3982-3991.
- Belmo, K., Neno, S.(2020).332925-Analisis Biaya-Volume-Laba sebagai Alat-3E504776. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 289. <https://media.neliti.com/media/publications/332925-analisis-biaya-volume-profit-as-alat-3e504776.pdf>
- Doherty dan Pfalzgraf.(1990).Teori-teori hubungan internasional yang bersaing.Survei komprehensif edisi ke-5
- Efendi Bahtiar dkk.Pengenalan penetapan biaya berbasis aktivitas di KKMU.*Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2, 53–63.<https://doi.org/10.32699/magna.v2i2.5408>
- Hansen dan Maryane M. Mowen. (2009). *Akuntansi Manajerial*.
- Ismayeni, L., Nugraha, M., Suryani, S., Suryani, L.H.(2020). Analisis biaya produk dan penetapan biaya berdasarkan aktivitas di UD Bersama.*Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 598–607.https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Menerapkan analisis biaya berbasis
- Mulyadi.(2005).Akuntansi biaya.Edisi 5, Yogyakarta: Biro Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Rasya, NA, Farayati, R., dan Ihsan, N.(2021). Analisis harga pokok produksi barang budidaya kayu di Pattaya-Indah menggunakan sistem Activity Based Costing.Penelitian *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 196-204.<http://journal.yrpiiku.com/index.php/raji>

SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: EQUITY CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF INVESTOR

Sumayyah

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
mayah1509@gmail.com

Inna Zahara

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
innazahara@gmail.com

ABSTRAK

Bisnis equity crowdfunding juga berlandaskan asas kepercayaan antara pihak yang memberikan dana yakni investor dengan pihak yang mengelola dana pihak pelaku UMKM. Sehingga dari kasus diatas keamanan dan perlindungan pada investor rupanya tidak berbanding lurus dengan peluang bagi pelaku bisnis dalam memperoleh alternatif permodalan. Oleh karena itu, Investasi equity crowdfunding juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif yang diprosikan dengan literatur review. Peraturan OJK sudah memuat mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Regulasi ini mencakup Equity Crowdfunding sebagai subjek bisnis dan lembaga jasa keuangan. Namun, peraturan ini hanya memberikan fasilitas bagi konsumen yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran oleh subjek bisnis, sehingga pendekatan perlindungan yang ada bersifat represif. Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan equity crowdfunding, yang masuk dalam sektor pasar modal, pendekatan perlindungan hukum yang lebih ditekankan adalah perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kepercayaan investor dalam menempatkan investasi mereka di pasar modal.

Kata kunci : Systematic literature review, Equity Crowdfunding, Fintech, Perlindungan Investor, UMKM.

ABSTRACT

The equity crowdfunding business is also based on the principle of trust between the party providing funds, namely investors, and the party managing the funds of MSME actors. So from the case above, it seems that security and protection for investors is not directly proportional to the opportunities for business actors to obtain alternative capital. Therefore, equity crowdfunding investment can also be linked to agency theory. In this research, the descriptive qualitative method is proxied by a literature review. OJK regulations already contain consumer complaint services in the financial services sector. This regulation covers Equity Crowdfunding as a business subject and financial services institution. However, this regulation only provides facilities for consumers who have experienced losses due to violations by business subjects, so the existing protection approach is repressive. Meanwhile, in the context of implementing equity crowdfunding, which is included in the capital markets sector, the legal protection approach that is more emphasized is preventive protection. This is due to the importance of investor confidence in placing their investments in the capital market.

Keywords : Systematic literature review, Equity Crowdfunding, Investor protection, SMEs

PENDAHULUAN

UMKM memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (Rosavina et al., 2019). Begitupula yang terjadi di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung negara karena berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Kontribusi UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan signifikan. Nilai kontribusi UMKM terhadap PDB berdasarkan data pada tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik mencapai Rp 5.721,1 milyar atau 57,24% dari total keseluruhan PDB dengan jumlah ekspor sebesar Rp 293,8 milyar atau 14,37% dari total keseluruhan ekspor. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh UMKM mencapai Rp 1.675,1 milyar atau 54,89% dari total keseluruhan investasi.

Terlepas dari kontribusi UMKM yang signifikan terhadap perekonomian negara, akses pendanaan UMKM terhitung relatif terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Survei Iklim Investasi pada seluruh UMKM di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa mayoritas UMKM kesulitan mendapatkan akses pendanaan sehingga, kecil kemungkinannya untuk menerima pembiayaan bank formal (Rosavina et al., 2019). Kondisi ini dapat terjadi karena kebanyakan UMKM dianggap tidak bankable dan berisiko tinggi. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC), ditemukan bahwa UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendanaan mencapai 74%.

Namun beberapa tahun terakhir mulai berkembang beberapa cara baru pendanaan eksternal yang dapat dijadikan solusi atas hambatan tersebut, salah satunya adalah pendanaan melalui Platform Equity Crowdfunding. Platform Equity Crowdfunding berbasis teknologi informasi pertama di dunia diluncurkan pada tahun 2007 di Australia, platform tersebut bernama Australian Small Scale Offerings Board (ASSOB). Lalu pada tahun 2010, Inggris juga mulai mengenal konsep Equity Crowdfunding ini melalui Platform Crowdcube. Sejak saat itu, konsep Equity Crowdfunding mulai berkembang pesat ke negara maju. Indonesia sendiri baru memperkenalkan dan menerapkan konsep ini pada akhir tahun 2018 meskipun sudah

banyak negara yang menerapkan konsep Equity Crowdfunding sebelumnya. Platform Equity Crowdfunding yang terdaftar dan telah mendapatkan izin dari OJK hingga November 2019 hanya berjumlah dua platform. Dua platform tersebut adalah Santara dari PT. Santara Daya Inspiratama yang mendapatkan izin pada 6 September 2019 dan Bizhare dari PT. Investasi Digital Nusantara yang mendapatkan izin pada 6 November 2019.

Meskipun demikian, persoalan didalam penerapan equity crowdfunding seperti pada aplikasi santara menuai masalah, dimana dana nasabah yang sudah diinvestasikan menjadi tidak jelas. Selain itu beberapa UMKM yang menjanjikan dividen kepada investornya belum dibayarkan (detiknews.com). hal itu disebabkan dari lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk pihak UMKM yang nakal. Dimana menurut peraturan OJK pada Pasal 66 PJOK 4/2018 hanya diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana. Dengan begitu berbagai risiko yang dapat ditanggung oleh investor seperti risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko kelangkaan dividen menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen dan perlindungan terhadap investor perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini karena, bisnis equity crowdfunding juga berlandaskan asas kepercayaan antara pihak yang memberikan dana yakni investor dengan pihak yang mengelola dana pihak pelaku UMKM. Oleh karena itu, dari kasus diatas dapat disimpulkan keamanan dan perlindungan pada investor rupanya tidak berbanding lurus dengan peluang bagi pelaku bisnis dalam memperoleh alternatif permodalan. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK hanya memuat ketentuan umum mengenai hak dari penerbit dan pemodal. Sehingga apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian dan pelaksanaan dalam equity crowdfunding pihak investor juga mendapatkan perlindungan yang memadai atas Investasi yang telah dilakukannya. Equity crowdfunding merupakan sebuah mekanisme penawaran saham yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dari para investor. Berbeda dengan penawaran saham melalui bursa efek, equity crowdfunding tidak dilakukan di dalam bursa efek. Dengan kata lain, perusahaan dan investor bertemu dalam suatu

sistem yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan penyelenggara. Equity crowdfunding merupakan bentuk pembiayaan dimana pengusaha melakukan panggilan terbuka untuk menjual sejumlah saham di perusahaan mereka melalui internet. Tujuan utamanya adalah untuk menarik sejumlah besar investor. Equity crowdfunding umumnya menargetkan investor swasta yang mendukung konsep bisnis yang diajukan. Equity crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang relevan, terutama bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sebagai skema pembiayaan alternatif untuk usaha awal, equity crowdfunding diposisikan dalam kerangka teoritis keuangan kewirausahaan dan teori pecking order. Teori pecking order dikembangkan oleh Myers dan Majluf pada tahun 1984, teori tersebut menjelaskan urutan prioritas para manajer dalam menentukan sumber pendanaannya. Teori pecking order menyatakan bahwa pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya mengikuti urutan kekuasaan dan memprioritaskan sumber pendanaan untuk mengurangi biaya: mereka mengatur struktur modal berdasarkan biaya pendanaan, yang bergantung pada asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham baru. Oleh karena itu, teori pecking order menunjukkan bahwa, pertama, perusahaan memilih dana internal yang tahan dari asimetri informasi; jika dana internal tidak tersedia, perusahaan menerbitkan utang dalam bentuk utang bank atau penerbitan obligasi. Jika dana internal dan pembiayaan bank/obligasi terbatas, maka penerbitan ekuitas dipertimbangkan. Jadi, pilihan terakhir kurang disukai karena tingginya asimetri informasi, dilusi kepemilikan, dan dengan demikian biaya pendanaan yang lebih tinggi. Pembiayaan usaha awal adalah masalah yang luar biasa (Eckhardt et al., 2006; Shane dan Cable, 2002; Cumming et al., 2019a; karena pengusaha tidak memiliki dana pribadi yang cukup, mereka tidak hanya menghadapi penjatahan kredit perbankan namun juga tidak memiliki persyaratan untuk mengakses Bursa Efek, baik untuk penerbitan obligasi atau saham (Kirby dan Worner, 2014). Hal ini memotivasi dasar-dasar pengembangan alternatif sarana pembiayaan, seperti halnya equity crowdfunding, walaupun equity crowdfunding dapat diartikan sebagai pilihan terakhir bagi pengusaha

atau perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan atau memiliki hutang yang berlebihan atau perusahaan dengan lebih banyak aset tidak berwujud atau kekurangan dana internal (Walthoff-Borm et al. 2018).

Pada dasarnya equity crowdfunding dapat mengurangi asimetri informasi dengan transparansi terhadap informasi mengenai usaha baru serta memungkinkan UMKM menunjukkan kualitas usaha mereka yang sebenarnya melalui teknologi informasi serta aplikasi equity crowdfunding yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai calon investor. Pihak-pihak yang terlibat dalam equity crowdfunding mencakup penerbit, platform penyelenggara yang menyediakan sistem elektronik terbuka, dan pemodal. Selain itu, hubungan hukum yang terjalin melibatkan perjanjian standar antara penyelenggara penggalangan dana dengan penerbit, serta antara penyelenggara penggalangan dana dengan pemodal. Dalam konteks ini, equity crowdfunding dapat dianggap sebagai bentuk mini Initial Public Offering (IPO). Kehadiran Equity Crowdfunding berfungsi sebagai penghubung bagi perusahaan terbatas yang ingin menjual saham mereka langsung kepada masyarakat, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan dana tambahan untuk pengembangan. Melalui equity crowdfunding, pemodal atau investor juga memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam perusahaan penerbit. Oleh karena itu, Investasi equity crowdfunding juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan teori yang menjelaskan adanya kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal sehingga menyebabkan konflik keagenan. Hal ini terjadi karena, agen (pengusaha) memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek bisnis dan investasi mereka. Sedangkan prinsipal (investor) memiliki informasi yang terbatas dan hanya mengetahui informasi tersebut dari agen (manajemen/pengusaha) area tersebut sangat memungkinkan terjadinya asimetris informasi. Oleh karena itu, para pendiri usaha baru menunjukkan prospek bisnis yang berkualitas dan menyampaikan informasi sebanyak mungkin untuk menarik banyak investor.

KAJIAN TEORI

Teori Agency (Agency Theory)

Teori agency menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan kuasa (principal) dan pihak yang diberi kuasa (agent). Dalam konteks ECF, investor (principal) memberikan modal kepada perusahaan startup (agent) dengan harapan bahwa agent akan menggunakan modal tersebut untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, ada potensi konflik kepentingan di sini karena manajemen perusahaan mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari investor. Teori agency membantu menjelaskan bagaimana konflik ini muncul, serta pentingnya mekanisme pengawasan dan kontrol seperti transparansi dan laporan keuangan dalam ECF untuk melindungi kepentingan investor (Astari & Agustina, 2022).

Teori Asimetri Informasi (Information Asymmetry Theory)

Dalam investasi melalui ECF, sering kali terdapat ketidakseimbangan informasi antara perusahaan yang mencari pendanaan dan investor yang menyediakan modal. Perusahaan biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi dan prospek bisnis mereka dibandingkan dengan investor. Asimetri informasi ini dapat mengarah pada masalah "adverse selection" (pemilihan yang tidak tepat) atau bahkan moral hazard (tindakan yang tidak sesuai setelah pendanaan). Investor harus mengandalkan informasi yang terbatas dari platform crowdfunding, yang menciptakan tantangan dalam pengambilan keputusan investasi. Teori ini menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan investor dalam ECF (Hisyam et al., 2024).

Teori Crowdsourcing dan Crowdfunding

Crowdfunding secara umum didasarkan pada teori crowdsourcing, di mana ide atau proyek didanai atau diselesaikan oleh kontribusi dari banyak individu. Dalam ECF, crowdsourcing dilakukan dalam bentuk penggalangan dana dengan imbalan kepemilikan saham. Teori ini menggambarkan bagaimana kekuatan kolektif dari banyak investor ritel dapat mengumpulkan modal yang cukup besar untuk mendanai perusahaan atau proyek baru. Crowdsourcing mencerminkan konsep "kebijaksanaan massa" (wisdom of the crowd), yang menyatakan bahwa banyak individu

secara kolektif dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu tunggal (Hisyam et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif yang diproses dengan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduktif untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari beberapa literatur menunjukkan bahwa terdapat berbagai peluang yang dapat dianalisis dalam berbagai tahap equity crowdfunding. Kuti, Bedó, & Geiszl (2017) merumuskan beberapa korelasi yang berkaitan dengan equity crowdfunding dan efisiensi. Dalam konteks equity crowdfunding berbasis ekuitas, penting bagi platform tersebut untuk memastikan bahwa para pengusaha dapat dengan tepat meningkatkan modal yang mereka butuhkan, dan bahwa para investor dapat dengan mudah mengakses peluang investasi yang relevan. Beberapa tahapan yang diuraikan oleh Brown, Mawson, & Rowe (2018) dalam konteks equity crowdfunding melibatkan fase pra-crowdfunding, di mana terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggalang dana melalui crowdfunding. Keputusan untuk menggunakan equity crowdfunding seringkali muncul karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan hubungan dengan pemberi dana lain, seperti lembaga perbankan. Namun, alasan di balik penggunaan crowdfunding seringkali lebih kompleks daripada sekadar akses modal; seringkali hal ini lebih berkaitan dengan kebutuhan untuk mengakses modal dan informasi dengan cepat.

Selain itu, perlindungan investor atas dana yang sudah diberikan menjadi suatu yang penting mengingat disetiap investasi terdapat risiko yang dapat diderita oleh investor. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) equity crowdfunding dengan jelas menyatakan bahwa equity crowdfunding adalah sebuah kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal (Pasal 2 ayat (2) POJK equity crowdfunding). Dalam

kerangka kegiatan di pasar modal, prinsip keterbukaan memiliki peranan yang sangat penting. Pengaturan dan implementasi prinsip keterbukaan memiliki peran kunci dalam melindungi investor. Keterbukaan merupakan prinsip utama dalam Initial Public Offering (IPO), oleh karena itu, equity crowdfunding seharusnya juga memberikan prioritas yang sama terhadap prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraannya. Prinsip keterbukaan ini berhubungan dengan hak hukum bagi pemodal untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perusahaan yang mereka investasikan. Penyelenggara dan penerbit bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan dalam layanan urun dana. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang tak terhindarkan yang harus diikuti oleh perusahaan yang melakukan go-public. Ini menjadi persyaratan penting karena perusahaan publik harus mematuhi prinsip keterbukaan, dan sebagai hasilnya, semua informasi penting mengenai perusahaan publik harus mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk pesaingnya (Kretarto, 2011). Definisi lainnya tentang prinsip keterbukaan adalah prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan transparan, dengan tujuan memfasilitasi pembentukan harga yang adil dan memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pihak (Borse, 2019). Selain itu, prinsip keterbukaan juga menjadi sarana utama dalam mencegah tindakan kriminal seperti penipuan dan manipulasi. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum, terutama perlindungan bagi para investor yang bertindak sebagai konsumen dalam sektor jasa keuangan. Akan tetapi, POJK equity crowdfunding belum mengatur prinsip keterbukaan, meskipun termasuk dalam ranah pasar modal, namun akan berdampak negatif pada jaminan perlindungan hukum bagi investor sebagai konsumen.

Sehingga hal ini mengakibatkan regulasi yang tidak pasti, menciptakan keterbatasan bagi regulator dalam mengikuti perkembangan. Terutama dalam konteks fintech, hukum tertinggal dari perkembangan teknologi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang ada. Dalam konsepnya, perlindungan hukum tidak dapat terwujud tanpa penegakan hukum yang memberikan rasa kepastian. Ketentuan perlindungan bagi investor dalam perannya sebagai konsumen dalam pelaksanaan Equity

Crowdfunding secara khusus tidak terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sebaliknya, aturan-aturan ini tersebar dalam berbagai peraturan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) bahkan belum mencakup aspek fintech, yang bisa dimengerti mengingat perkembangan fintech pada tahun 2012-2013 belum secepat perkembangan belakangan ini. Selain itu, terdapat juga Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Aduan Konsumen Jasa Keuangan). Meskipun demikian, peraturan tersebut juga belum mencakup aspek equity crowdfunding. Sehingga, OJK menerbitkan kembali POJK Pada tahun 2020. Dengan diterbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK (POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen Oleh OJK). Regulasi ini mencakup Equity Crowdfunding sebagai subjek bisnis dan lembaga jasa keuangan. Namun, peraturan ini hanya memberikan fasilitas bagi konsumen yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran oleh subjek bisnis, sehingga pendekatan perlindungan yang ada bersifat represif. Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan equity crowdfunding, yang masuk dalam sektor pasar modal, pendekatan perlindungan hukum yang lebih ditekankan adalah perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kepercayaan investor dalam menempatkan investasi mereka di pasar modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Equity Crowdfunding adalah cara inovatif bagi usaha baru untuk mendapatkan pembiayaan alternatif dalam lingkungan Fintech. Equity Crowdfunding ditujukan kepada investor jenis baru, yang mungkin kurang berpengalaman dengan instrumen keuangan sehingga dapat melihat berbagai jenis informasi, sehingga penting untuk menyediakan data yang mudah dibaca. Disisi lain, equity crowdfunding menjadi opsi penyelamatan UMKM dari kebangkrutan melalui kesempatan mendapatkan dana tambahan. Equity crowdfunding mempertemukan entitas penerbit saham dengan para calon investor. Selain itu,

melalui platform equity crowdfunding, entitas bisnis dapat mempromosikan usahanya sehingga dapat mendongkrak kinerja dan nilai bisnisnya. Namun dalam segi perlindungan investor di Indonesia masih lemah hal ini karena peraturan yang ada di Indonesia hanya memberikan fasilitas bagi konsumen yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran oleh subjek bisnis, sehingga pendekatan perlindungan yang ada bersifat represif. Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan equity crowdfunding, yang masuk dalam sektor pasar modal, pendekatan perlindungan hukum yang lebih ditekankan adalah perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kepercayaan investor dalam menempatkan investasi mereka di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprihasyyati, D. A., & Fitria, S. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity
- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158-166.
- Astari, M., & Agustina, I. F. (2022). *Crowdfunding Government 's Role in Crowdfunding -Based Local MSME Development Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Lokal Berbasis (Crowdfunding). 2021(57)*, 1–10.
- Brown, R., Mawson, S., & Rowe, A. (2019). Start-Ups, Entrepreneurial Networks And Equity Crowdfunding: A Processual Perspective. *Industrial Marketing Management*, 80, 115–125.
<https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.02.003>
- Crowdfunding Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Management*, 9(2).
- Cumming, D., Deloof, M., Manigart, S. and Wright, M. (2019a), “New directions in entrepreneurial finance”, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 100 No. C, pp. 252-260.
- Eckhardt, J.T., Shane, S. and Delmar, F. (2006), “Multistage selection and the financing of new ventures”, *Management Science*, Vol. 52 No. 2, pp. 220-232.
- Erdinata, F. (2021). Hifdzu mal dalam financial technology berbasis sistem equity crowdfunding: studi kasus di PT Santara Daya Inspiratama (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Fariad, F. S., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N.H., & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*.
- Hariato, C. (2020). *Regulating Equity Crowdfunding in Indonesia* (Doctoral dissertation, Victoria University).
- Hisyam, C. J., Faridah, Kurniawan, N. A., Ginting, N. M. B., & Purba, V. C. (2024). Analisis platform kitabisa.com sebagai praktik crowdfunding dan dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 782–790.
- Irawati, I. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).
- Josua, G. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Karo, R. K., & Luna, L. (2019). Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory Sandbox Oleh Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 116-125.
- Kuti, M., Bedó, Z., & Geiszl, D. (2017). Equity-Based Crowdfunding *. *Financial And Economic Review*, 16(4), 187–200.
- Martiniasih, N., & Saravistha, D. B. (2022). Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia.

- Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(08), 837-851.
- Myers, S.C. and Majluf, N.S. (1984), "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have", *Journal of Financial Economics*, Vol. 13 No. 2, pp. 187-221, doi: 10.1016/0304-405X(84)90023-0.
- Muadzhan, T. G., & Nugroho, B. Y. (2021). Analisis Optimasi Model Bisnis Perusahaan Fintech Berbasis Equity Crowdfunding Menggunakan Business Model Canvas. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3065-3079.
- Nugraha, A. E. P. (2019, November). Peluang Equity Crowdfunding di Indonesia. In *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)* (pp. 319-324).
- Pamesti, P. I., & Heradhayksa, B. (2020). Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara. id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 20-37.
- Poluan, P. (2022). HUBUNGAN HUKUM DIDALAM INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING YANG BERBASIS PLATFORM SANTARA (Doctoral dissertation).
- Pratiwi, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3),
- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.
- Sangwan, V., Prakash, P., & Singh, S. (2020). Financial technology: a review of extant literature. *Studies in Economics and Finance*, 37(1), 71-88.
- Shane, S. and Cable, D. (2002), "Network ties, reputation, and the financing of new ventures", *Management Science*, Vol. 48 No. 3, pp. 364-381.
- Yasar, B. (2021). The new investment landscape: Equity crowdfunding. *Central Bank Review*, 21(1), 1-16.
- Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowdfunding) di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 4(2).

ASPEK KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUSTAINABILITY UMKM DI KECAMATAN TARIK SIDOARJO

Andin Cipta Putri

Universitas Muhammadiyah Surabaya
andinciaptaputri92@gmail.com

Nurullaili Mauliddah

Universitas Muhammadiyah Surabaya
nurullailimauliddah@um-surabaya.ac.id

Budi Wahyu Mahardhika

Universitas Muhammadiyah Surabaya
budi.wahyu.m@um-surabaya.ac.id

Didin Fatihudin

Universitas Muhammadiyah Surabaya
didinfatihudin@um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu peran bagi Usaha mikro, kecil dan menengah dalam mencapai pertumbuhan perekonomian di negara berkembang khususnya Indonesia. Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan nasional karena mendapat julukan sebagai “Kota UMKM Indonesia”. Tarik sebagai salah satu bagian yang berada di Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah UMKM relatif banyak. Namun demikian, pelaku UMKM yang kurang mampu mengelola keuangan dengan baik dan masih manual dalam melakukan transaksi penjualan. Menganalisa pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan *financial technology* terhadap keberlangsungan usaha UMKM merupakan tujuan dari penelitian ini. Sampel riset meliputi para pelaku usaha UMKM Kecamatan Tarik yang masih aktif dengan jumlah 100 responden. Penelitian kuantitatif dengan sumber data primer menggunakan kuesioner yang telah dikukan pengujian validitas dan reliabilitas. Peneliti melakukan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan teknik pemilahan sampel *stratified random sampling*. Pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS versi 26.

Kata kunci : *Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Financial Technology, Keberlangsungan Usaha, UMKM*

ABSTRACT

The absorption of labor is one of the roles of micro, small, and medium enterprises in achieving economic growth in developing countries, especially Indonesia. Sidoarjo is one of the areas that are in the national spotlight because it has earned the nickname "Indonesian MSME City." Tarik, as a part of Sidoarjo Regency, has a relatively large number of MSMEs. However, MSMEs are less able to manage their finances well and are still manual in carrying out sales transactions. Analyzing the influence of financial literacy, financial inclusion and financial technology on the sustainability of MSME businesses is the aim of this research. The research sample included MSME business actors in Tarik District who were still active, with a total of 100 respondents. Quantitative research with primary data sources uses questionnaires that have been tested for validity and reliability. Researchers carried out the analysis using multiple linear regression analysis with stratified random sampling techniques. Data processing uses SPSS version 26 program tools.

Keywords : *Literacy, Financial Inclusion, Financial Technology, Enterprise Sustainability, MSME*

PENDAHULUAN

Peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memang sangat signifikan. Adanya sektor UMKM dapat menyerap pengangguran karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun peran UMKM sangat potensial namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam perjalanannya. Keterlambatan perkembangan menjadi hal yang sering terjadi dengan perjalanan yang stag pada satu tingkat pendapatan saja, kondisi ini dilatarbelakangi problem tradisional yang tidak menemukan solusi secara clear seperti kualitas sumber daya manusia, hak milik usaha, pendanaan, marketing dan berbagai masalah yang bersinggungan dengan UMKM (Mila & Nurhidayah, 2022). Pola pikir pengelola UMKM dalam mengambil keputusan tidak memikirkan jangka panjang, hal tersebut dapat dimungkinkan inovasi yang untuk mempertahankan *sustainability* siklus hidup UMKM tidak menjadi pertimbangan sehingga menyebabkan keberlangsungan hanya dipertimbangkan dalam jangka pendek dan inovasi tidak terarah hanya untuk menyelesaikan kebutuhan solusi jangka pendek yang berujung pada minimalnya inovasi.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah dengan kuantitas UMKM cukup besar dalam berbagai sektor pelayanan. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo jumlah pengelola UMKM sampai dengan tahun 2024 sebesar 150.724 yang bergerak pada beragam sektor dan tersebar di 18 Kecamatan. Adapun macam-macam sektor usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo diantaranya sektor makanan dan minuman, *handy craft*, jasa, pengrajin, *fashion*, sembako, agrobisnis, teknologi internet dan lain-lain.

Tabel.1 Daftar jumlah UMKM di kecamatan tarik

Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro
Tarik	3.786
Prambon	4.233
Kremlung	10.305
Porong	6.390
Jabon	4.823
Tanggulangin	11.623
Candi	10.225
Tulangan	8.742
Wonoayu	4.880
Sukodono	5.407
Sidoarjo	21.460
Buduran	5.361
Sedati	6.593
Waru	10.046
Gedangan	7.911
Taman	8.655
Krian	12.988
Balombangendo	7.294
Kabupaten Sidoarjo	150.724

Berdasarkan kondisi dan pengamatan secara langsung, para pelaku UMKM di Kecamatan Tarik dimungkinkan belum mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kemajuan usaha. Berdasarkan penelitian, pengelola UMKM di Kecamatan Tarik masih merasakan banyaknya kendala dalam pengembangan usaha baik dari aspek permodalan serta akses dalam menjangkau sumber modal melalui pinjaman yang legal seperti perbankan dan lembaga lain. Berdasarkan hasil pra survey diketahui bahwa Pengetahuan pengelolaan keuangan UMKM masih dalam standar yang kurang. Kurangnya pengetahuan akan keuangan menjadikan pelaku usaha ini cenderung dihadapkan pada masalah pinjaman yang berujung pada tunggakan. Tingginya biaya kredit serta kurangnya kemampuan dalam merencanakan masa depan.

Berdasarkan kondisi objek dan teori yang telah disampaikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini ingin menganalisis apakah literasi keuangan (X_1) berdampak terhadap keberlangsungan usaha

(Y) UMKM Tarik Sidoarjo?, Apakah inklusi keuangan (X_2) berdampak terhadap keberlangsungan usaha (Y) UMKM Tarik Sidoarjo?, Apakah *financial technology* (X_3) berdampak terhadap keberlangsungan usaha (Y) UMKM Tarik Sidoarjo?, ketiga variabel bebas tersebut berdampak secara simultan terhadap keberlangsungan usaha (Y) UMKM di Kecamatan Tarik.

Perumusan masalah tersebut dapat diturunkan menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisa pengaruh literasi keuangan (X_1), inklusi keuangan (X_2) dan *financial technology* (X_3) secara parsial terhadap keberlangsungan usaha (Y) UMKM di Kecamatan Tarik serta untuk menganalisa pengaruh secara simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap keberlangsungan usaha (Y) UMKM di Kecamatan Tarik.

KAJIAN TEORI

A. Teori Perilaku Keuangan (*Theory of Financial Behavior*)

Penelitian ini didasarkan pada teori perilaku keuangan yang didasari oleh harapan seseorang dalam penyesuaian tingkat pendapatan dengan kebutuhan hidup yang sesuai. *Theory of financial behavior* atau teori perilaku keuangan merupakan konsep pemahaman yang dihubungkan dengan tingkah laku masyarakat dalam mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dalam hal ini adalah uang dan pendapatan. Perilaku keuangan sebagai kemahiran atau tindakan yang dilakukan individu dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, penemuan dan pengumpulan dana keuangan sehari-hari. Perilaku keuangan bertujuan untuk menyimpan sumber daya pendapatan dengan cara *saving* dana dan menjaga agar dana tersebut tetap aman.

B. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu kemampuan untuk mengerti tentang risiko dan

konsep financial yang gunakan penerapannya dalam kehidupan dalam rangka menuju kehidupan yang sejahtera khususnya dalam hal pendanaan (Julita, 2023). Literasi keuangan merupakan kesanggupan seseorang dalam mengendalikan keuangan agar dapat hidup lebih makmur dan berkecukupan dimasa yang akan datang (Chen, H & Volpe, 1998). Literasi keuangan berperan penting dalam sektor keuangan serta memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian karena pada kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan keuangan

C. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses atau layanan terhadap lembaga, instrumen dan kontrak yang digunakan dalam layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya (SNLKI, 2021). Inklusi keuangan sangat dibutuhkan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena dapat menyuguhkan jaringan secara leluasa dan menurunkan kendala-kendala yang terjadi dalam memberikan layanan finansial (Rahayu & Rahmawati, 2022).

D. *Financial Technology*

Fintech merupakan kombinasi sistem dan teknologi layanan jasa financial baik pembiayaan maupun tabungan yang menawarkan akses yang mudah dalam melaksanakan kegiatan financial bagi masyarakat ketika menggunakan layanan financial tersebut (Marginingsih, 2021; Ningsih et al., 2022; Putri & Christiana, 2021). Penggunaan *fintech* bagi para pelaku usaha memiliki banyak manfaat dan benefit diantaranya dapat menyediakan kesempatan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, sarana penawaran serta lebih melimpah keuntungan yang didapatkan dalam menggunakan *fintech*.

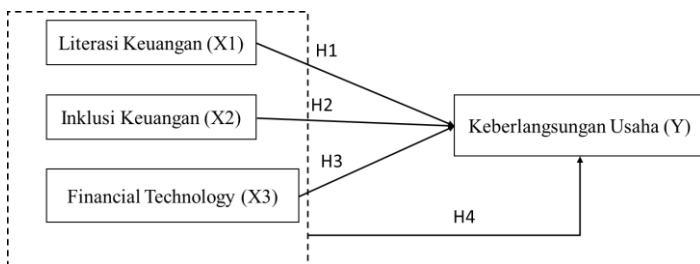
E. Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha merupakan keadaan usaha yang memiliki jalan untuk menjaga, memperluas dan menjaga resource serta memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Keberlangsungan usaha (*business sustainability*) pada UMKM dilihat dari

kesuksesan jaringan usaha saat berinovasi, peningkatan kualitas kerja serta kembalinya modal awal untuk meningkatkan kesejahteraan.

F. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan, maka terdapat sebagian pemahaman yang menjadi ukuran bagi peneliti yang dirasa tepat digunakan untuk menjalankan penelitian ini. (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021) melakukan penelitian dengan berkaitan dengan variabel penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian mendapatkan hasil bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM. Sedangkan literasi mempunyai daya ungkit terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha dengan objek UMKM.

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan, maka terdapat sebagian pemahaman yang menjadi ukuran bagi peneliti yang dirasa tepat digunakan untuk menjalankan penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada teori perilaku keuangan. Perilaku keuangan dapat menjadi turunan konsep variabel dalam riset ini, diantaranya literasi keuangan, inklusi keuangan, financial technology dan keberlangsungan usaha.

Literasi keuangan dapat membahas perencanaan keuangan agar suatu bisnis yang dimiliki dapat berjalan dengan baik. Inklusi keuangan merupakan instrumen-instrumen

keuangan yang meliputi tabungan, investasi dan sebagainya. Adapun fintech sebagai media untuk membantu para pelaku usaha untuk membentuk perilaku keuangan yang baik

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksplanatori pendekatan kuantitatif. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dari penggalan data dengan kuesioner yang diserahkan kepada pengelola UMKM di Kecamatan Tarik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kecamatan Tarik, yaitu sebesar 3.786 UMKM. Adapun sampel penelitian ini sejumlah 100 UMKM yang didapatkan dari rumus *Slovin* (santoso, 2023).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

N = populasi
n = sampel
e = error (0,1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun kerangka konsep yang menghubungkan antara literasi keuangan, inklusi keuangan dan *financial technology* terhadap keberlangsungan usaha UMKM sebagai berikut.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik - t

Uji statistik - t termasuk sebuah pengujian hipotesis yang dimanfaatkan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.778	1.668		11.256	.000
Financial literacy (X1)	.095	.043	.206	2.198	.030
Inklusi Keuangan (X2)	.300	.060	.472	5.006	.000
Financial Technology (X3)	.077	.037	.166	2.083	.040

a. Dependent Variable: Keberlangsungan Usaha (Y)

Sumber : Data diolah SPSS, 2024

(1) Hasil pengujian Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha

Berdasarkan tabel 1 dijelaskan nilai t_{hitung} sebesar 2,198 dan t_{tabel} sebesar 1,660 sehingga dapat disajikan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta didapatkan nilai probabilitas $0,030 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, dimana variabel independen literasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen keberlangsungan.

(2) Hasil pengujian Inklusi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha

Nilai yang diperoleh dari tabel 1 dimana nilai t_{hitung} sebesar 5,006 dan t_{tabel} sebesar 1,660 penyimpulannya menjadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta diketahui nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Adanya hasil tersebut hipotesis dapat diartikan H_2 diterima dan H_0 ditolak, dimana

variabel dependen keberlangsungan usaha dipengaruhi secara signifikan oleh inklusi.

(3) Hasil pengujian Financial Technology terhadap Keberlangsungan Usaha

Nilai t_{hitung} sebesar 2,083 dan t_{tabel} sebesar 1,660 diperoleh dari tabel 1 sehingga disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta diperoleh nilai signifikan $0,040 > 0,05$. Adanya hasil tersebut hipotesis dapat diartikan H_3 diterima dan H_0 ditolak, dimana variabel independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Statistik - F (Simultan)

Pengaruh secara simultan dari masing-masing variabel x terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui Uji statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	74.429	3	24.810	31.882	.000 ^b
Residual	74.705	96	.778		
Total	149.135	99			

a. Dependent Variable: Keberlangsungan Usaha (Y)

b. Predictors: (Constant), Financial Technology (X3), Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2)

Pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen dapat dilihat dari hasil uji F tabel 2. Pembuktiannya dari nilai F_{hitung} sebesar 31.882 dengan nilai signifikansi (sig) 0.000. Sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,70 sehingga dari hasil perhitungan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($5,411 > 2,70$) sehingga H_0 ditolak.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Kontribusi variabel independen terhadap dependen dapat diketahui melalui analisis pada koefisien determinasi ini. Koefisien determinasi bernilai 0 sampai dengan 1, dimana apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa prediksi yang dibutuhkan oleh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen termasuk informasi yang dibutuhkannya.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	.499	.483	.882

a. Predictors: (Constant), *Financial Technology* (X3), Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2)

Sumber : Data diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil R^2 sebesar 0,499 lebih dari 0,05 menampilkan yang menampilkan hasil terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang kuat sehingga dapat hasil korelasi yang kuat dapat disimpulkan. Uji R^2 antara variabel independen dengan variabel dependen didapat sebesar 0,499. Maka 49,9% faktor variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan 50,1% dijelaskan variabel lain diluar variabel yang diteliti, diantaranya alokasi keuangan, pendapatan, kinerja UMKM, *locus of control* dan sebagainya.

(1) Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Tarik

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Literasi Keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha, maka H_1 diterima.

Apabila dikaitkan dengan teori perilaku keuangan maka memiliki keterkaitan dimana semakin orang berkemampuan dalam literasi keuangan individu, maka akan meningkatkan kebaikan dalam perilaku keuangan individu tersebut. Berdasarkan teori tersebut, suatu tindakan yang dilakukan oleh individu akan dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang mereka miliki. Literasi keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,27 dimana menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan keuangan dengan baik serta usaha dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Pendukung dari hasil penelitian ini adalah peneliti sebelumnya (Maulana et al., 2022; Nantungga, 2022; Yuningsih et al., 2022) yang menyatakan bahwa Keberlangsungan Usaha dipengaruhi secara positif signifikan oleh Literasi Keuangan.

(2) Inklusi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Tarik

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Inklusi Keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha, maka H_2 diterima.

Berdasarkan teori perilaku keuangan, akses layanan jasa keuangan terhadap masyarakat luas diperluas oleh inklusi keuangan yang selama ini terbatas. Inklusi keuangan dengan rata-rata senilai 4,27 yang berarti bahwa responden dengan pendidikan akhir SMA sebesar 49% otomatis mudah memanfaatkan lembaga jasa keuangan untuk bantuan dalam transaksi dan modal dengan tujuan jangka panjangnya.

Penelitian pendahulu telah mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021; Yanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa Keberlangsungan

Usaha dipengaruhi secara positif signifikan oleh financial inclusion.

(3) Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Tarik

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Keberlangsungan Usaha dipengaruhi secara signifikan oleh *Financial Technology* dengan hasil H_3 diterima.

Berdasarkan teori perilaku keuangan, kemajuan dalam bidang keuangan memudahkan UMKM dalam mengakses produk-produk keuangan. *Financial Technology* memiliki rata-rata senilai 4,45 yang menunjukkan bahwa responden mudah memanfaatkan layanan *fintech*, khususnya aplikasi *fintech* atau *e-wallet* untuk melakukan berbagai pembayaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budyastuti, 2021; Yuningsih et al., 2022) bahwasannya yang menyatakan bahwa Keberlangsungan Usaha dipengaruhi secara positif signifikan oleh *Financial Technology*.

(4) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Tarik

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diperoleh bahwa ketiga variabel independen yaitu Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Financial Technology* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha.

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan jangka panjangnya.

Pebisnis mendapatkan akses untuk meningkatkan permodalan dan memperluas jangkauan bisnis melalui Inklusi keuangan. Penggunaan produk financial yang banyak ditawarkan melalui produk maupun layanan jasa keuangan. Inovasi keuangan yang menghasilkan model bisnis baru dengan mengadaptasi teknologi didalamnya sehingga proses bisnis dapat dimanfaatkan masyarakat dengan mudah dikendalikan dan dikembangkan. Fasilitas ini yang terkait

dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan (Erlangga & Krisnawati, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM di Kecamatan Tarik. SPSS 26 sebagai alat analisis dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

(1) Keberlangsungan Usaha UMKM dipengaruhi secara parsial dan signifikan oleh variabel Literasi Keuangan sebagai hasil yang pertama dalam penelitian ini yang sesuai dengan H_1 dan diterima.

(2) Secara parsial menunjukkan bahwa variabel Inklusi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM. Kesesuaian pernyataan H_2 yang menyatakan adanya pengaruh ini diterima.

(3) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa *Financial Technology* mempengaruhi signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM, maka H_3 dapat diterima.

(4) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM, maka H_4 dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyastuti, T. (2021). Pengaruh financial technology dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(Desember), 169–170.

- <https://www.neliti.com/publications/431668/pengaruh-financial-technology-dan-literasi-keuangan-terhadap-keberlangsungan-usa>
- Chen, H & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. [https://doi.org/10.1016/s1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7)
- Erlangga, M. Y., & Krisnawati, A. (2020). Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 53. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2020.151.348>
- Fatihudin, D. (2019). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Dari Teori Ke Praktek*, Zifatama Jawa Sidoarjo.
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Julita, J. (2023). Penerapan Financial Technology Dan Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Industri Mikro Kecil (IMK). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(2), 203–209. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MA NEGGIO/article/view/17905>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Maulana, R., Murniningsih, R., & Prasetya, W. A. (2022). The Influence Of Financial Literacy, Financial Inclusion, And Fintech Toward Business Sustainability In SMES. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 440(4), 440–452. <http://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/index>
- Mila, S., & Nurhidayah, S. A. (2022). Peran Literasi Finansial dan Inovasi Digital dalam Meningkatkan Business Performance dan Business Sustainability Pada UMKM di Kabupaten Pekalongan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 212–227. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/994>
- Nantunnga, K. H. (2022). Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlanjutanumkm Di Kabupaten Sleman Denganinklusi Keuangansebagai Variabel Mediasi. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/43668/17312079.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Putri, L. P., & Christiana, I. (2021). Peran financial technology dalam membantu umkm di tengah pandemi covid-19. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 57–63.
- Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2022). Financial Management Of Msme In Culinary Industry According To Demographics And Financial Literacy. *Journal of Management and Business Environment (JMBE)*, 4(1), 82–99. <https://doi.org/10.24167/jmbe.v4i1.4626>
- Santoso, A. (2023). Rumus Slovin : Panacea Masalah Ukuran Sampel? *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4(2), 24–43. <https://doi.org/10.24071/suksma.v4i2.6434>
- SNLKI. (2021). *Nasional Literasi Keuangan Indonesia*.
- Yanti, W., Zuhroh, S., Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti, S. (2022). *The Effect of Financial Inclusion and Financial Literacy on*

*the Sustainability of Culinary Business
in West Palu District. 05, 515–525.*

Yuningsih, Y. Y., Raspati, G., & Riyanto, A.
(2022). Pengaruh literasi keuangan dan
financial technology terhadap
keberlangsungan usaha pelaku
UMKM. *Mirai Management*, 7(2),
531–540.

PERLAKUAN AKUNTANSI KARBON PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER *NON CYCLICALS* DI INDONESIA

Yohana Febiani Angi

Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Sektor perusahaan *consumer non-cyclicals* paling terdampak pandemic covid yang ditandai dengan turunnya saham dari sektor tersebut sehingga yang harus dipertahankan dalam perusahaan tersebut adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diperoleh dengan memperhatikan proses produksi dari *consumer non-cyclicals* yang mengarah pada ekonomi hijau sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan akuntansi lingkungan dalam pelaporan keuangan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi, melakukan pencatatan, penyajian dan pelaporan akuntansi lingkungan berdasarkan PSAK. Penilaian dampak akuntansi lingkungan terhadap rasio keuangan perusahaan dengan melakukan perhitungan offset kapasitas penyerapan karbon akibat aktivitas produksi. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibatasi perhitungan hilangnya kapasitas penyerapan karbon, potensi karbon yang dihasilkan dan dampak emisi karbon lainnya terhadap proses produksi.

Kata kunci : Akuntansi Karbon, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan, Emisi karbon, Perusahaan, Standar Akuntansi Keuangan

ABSTRACT

Corporate sector consumer non-cyclicals most affected by the Covid pandemic which was marked by a decline in shares in this sector so that what must be maintained in the company is the company value. Company value can be obtained by paying attention to the production process consumer non-cyclicals which leads to a green economy so it is important for companies to implement environmental accounting in financial reporting. The research objective is to evaluate, record, present and report environmental accounting based on PSAK. Assessment of the impact of environmental accounting on the company's financial ratios by calculating the offset of carbon absorption capacity due to production activities. Therefore, this research is limited to calculating the loss of carbon absorption capacity, the potential carbon produced and the impact of other carbon emissions on the production process.

Keywords : Carbon Accounting, Financial Ratios, Financial Statements, Carbon Emissions, Company, Financial Accounting Standards

PENDAHULUAN

Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan selama 2010–2019 seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penurunan tingkat kemiskinan. Dengan trajektori tersebut, Indonesia dipuji sebagai

negara yang baru muncul dan diprediksi akan menjadi salah satu ekonomi besar bersama dengan China, India, dan Brasil pada tahun 2050 (PwC, 2017). Komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon ditunjukkan dengan membuat kebijakan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab

emisi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil perhitungan pemerintah pertumbuhan rendah karbon dapat memberikan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6% sampai pada tahun 2045 dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2019). Semua indikasi ini telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status pendapatan tinggi pada tahun 2045. Namun, pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah menciptakan krisis multidimensi yang tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi peningkatan terhadap jumlah kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menanggapi pandemi, Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk menyelamatkan nyawa sambil pada saat yang sama menjaga perekonomian tetap bertahan. Investasi besar telah dialokasikan dalam program perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah telah membelanjakan APBN sebesar IDR 500–557 triliun melalui program PEN, rata-rata sebesar 73,5% dari total anggaran yang dialokasikan. (Kementerian Keuangan RI, 2022). Krisis yang terjadi akibat pandemic covid-19 tersebut terjadi bersamaan dengan krisis terhadap iklim yang dihadapi secara global. Perubahan iklim yang terjadi sangat berdampak pada setiap aspek kegiatan global dan hal ini juga dihadapi oleh Indonesia. Curah hujan yang semakin sedikit, musim panas yang berkepanjangan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan Indonesia mengalami

5.402 bencana pada tahun 2021, di mana 5.377 di antaranya terkait dengan bencana hidrometeorologi (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022). Ini mengonfirmasi laporan terbaru IPCC yang menandakan kode merah untuk umat manusia, menyoroti peningkatan suhu global ke 1,5°C lebih cepat dari yang diprediksi sebelumnya dan dampak iklim termasuk bencana terkait iklim lebih parah dari yang diharapkan (IPCC, 2021). Visi Indonesia 2045 dengan berani menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2036 (Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2019) melampaui ambang Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar USD 12.695 (World Bank, 2021). Namun visi tersebut menjadi tidak realistis akibat adanya pandemi COVID-19 dan krisis perubahan iklim, sehingga pemerintah merubah kebijakan mengarah kepada pembangunan ekonomi hijau.

Perubahan kebijakan pembangunan menuju kepada ekonomi hijau telah disepakati oleh negara-negara lain yang masuk dalam perjanjian Paris, bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial harus didasarkan pada kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pada bulan Juni 2012, Rio de Janeiro menjadi tuan rumah konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) mengeluarkan dokumen hasil yang berjudul "Masa Depan yang Kita Inginkan" dan dalam dokumen tersebut, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan maka ekonomi hijau adalah salah satu instrument dasar untuk mencapainya (UNGA, 2012).

Kelompok sector dalam Bursa Efek Indonesia mengalami pembaruan pada tahun 2021. Perubahan terbaru ini, *sector consumer goods* (barang konsumen) terbagi dalam 2 klasifikasi terpisah yaitu kelompok mencakup konsumen utama dan konsumen non utama.

Fenomena yang terjadi dalam sektor *consumer non-cyclicals* salah satunya yaitu indeks saham memiliki pergerakan yang fluktuatif yang cukup agresif akibat pandemi. Dibuktikan dengan data nilai indeks *consumer non-cyclicals* dibawah ini yang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 indeks sektor ini mencapai persentase 5,01% per year on year. Pada tahun 2020 nilai indeks consumer non-cyclicals mengalami penurunan hingga 1,64% per year on year. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang agresif mencapai 11,29% per year on year, sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks sektor primer mengalami peningkatan pesat mencapai 7,89% per year on year. Nilai indeks consumer non-cyclicals adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://id.investing.com>, 2024

Menurut (Dewi & Edward Narayana, 2020), seiring berjalannya waktu dan berkembangnya trend industri global membuat faktor ekonomi bukan lagi satu- satunya pengukuran terhadap nilai perusahaan. Saat perusahaan hanya terfokus pada profitabilitas saja, maka ada kemungkinan terjadi penyimpangan usaha. Contoh penyimpangan yang terjadi misalnya ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan stakeholder termasuk masyarakat. Perubahan yang ada membuat konsep-konsep mengenai keberlangsungan usaha terus disempurnakan.

Alasan dipilihnya sektor *consumer non-cyclicals* dalam penelitian ini karena sektor ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar pada Bursa

Efek Indonesia dan sektor yang memenuhi kebutuhan utama masyarakat (Nugroho & Munari, 2021).

KAJIAN TEORI

1. Teori Stakeholder

Teori Stakeholder teori yang digagas oleh (Edward Freeman et al., 2010), menjabarkan bahwa perusahaan memiliki manfaat untuk para stakeholder (pemerintah, employee, shareholder, masyarakat, customer, supplier, dan pihak-pihak lainnya) dengan terbuka terhadap informasi-informasi terkait perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa aktivitas perusahaan yang secara langsung berkaitan, misalnya: polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan (Ulum, 2022). S. Harrison & C. Wicks (2019) mengartikan teori stakeholder sebagai link yang berpotensi menjembatani informasi yang seimbang antar pihak-pihak berkepentingan. Sedangkan menurut Mona Ganiem & Kurnia (2019), pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan seseorang atau kelompok yang saling memberikan *feedback* oleh tindakan perusahaan. Dari Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder adalah konsep seseorang atau kelompok yang saling memberikan efek berupa informasi yang berkaitan mengenai kegiatan perusahaan antar pihak-pihak berkepentingan (Edward Freeman et al., 2010; Mona Ganiem & Kurnia, 2019; S. Harrison & C. Wicks, 2019). Perusahaan yang menerapkan pengungkapan emisi karbon dan akuntansi hijau (green accounting) artinya telah melakukan teori stakeholder karena dengan pengungkapan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan yang dilakukan berarti perusahaan telah membagikan informasi-informasi yang

semestinya atas pertanggungjawaban terhadap lingkungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk di dalamnya yaitu masyarakat dan investor. Informasi-informasi yang dibagikan perusahaan akan menimbulkan feedback berupa dukungan dari para stakeholder. Hal ini sangat diperlukan sebagai garansi masa depan perusahaan dalam nilai perusahaan (Dewi & Edward Narayana, 2020).

2. Akuntansi Lingkungan

Proses menggambarkan biaya lingkungan sehingga pemangku kepentingan di perusahaan memperhatikan biaya tersebut (Ikhsan, 2008). Tujuan akuntansi hijau adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lingkungan ke dalam pencatatan akuntansi. Berbeda dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2009) tentang PSAK 57 yang mendefinisikan provisi sebagai kewajiban yang waktu dan jumlahnya tidak pasti. Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari operasi rutin bisnis, dengan syarat peningkatan ekuitas tidak menyertakan kontribusi investasi modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) tentang PSAK 23. Akuntansi membedakan 2 kategori yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional yang berasal dari aktivitas perusahaan. Penerapan akuntansi lingkungan didasarkan pada PSAK 23 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan operasional pada organisasi sektor kehutanan merupakan hasil penjualan produk hutan, baik itu produk turunan dari kayu, hasil penebangan dan produk sektor kehutanan lainnya.

Menurut Simamora (2002), beban adalah biaya yang telah dipergunakan (*expired cost*) dalam melaksanakan

aktivitas perusahaan, sementara dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan PSAK 2007 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), beban didefinisikan sebagai pengurangan terhadap manfaat ekonomi selama periode akuntansi seperti pengeluaran kas, pengurangan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengurangi ekuitas dengan tidak memasukan pembagian kepada pemegang saham. Sedangkan beban atau biaya yang dihasilkan oleh aktivitas pada sektor kehutanan merupakan *opportunity cost* sumber daya ekonomi yang diukur dengan menggunakan satuan uang, baik yang sudah dilaksanakan maupun perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, biaya dipahami sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh asset (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Dalam konteks perusahaan kehutanan, PSAK 32 (2007) mengenai akuntansi kehutanan mengatur penetapan harga pokok produksi kayu tebangan dan produk hutan lainnya mencakup beban yang terkait dengan aktivitas perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemanenan hasil hutan, pemenuhan kewajiban negara, kewajiban lingkungan dan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Sedangkan produk kehutanan yang masuk dalam kategori Hutan Tanaman Industri (HTI), beban yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan kehutanan dicatat sebagai beban umum dan administrasi. Aset tak berwujud adalah aktiva tak lancar (*non current asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain (PSAK 19

2010). Aset kontijensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. (PSAK 57 2009).

3. Akuntansi Karbon (*Carbon Accounting*)

Akuntansi karbon merupakan akuntansi yang memasukkan aspek-aspek terkait karbon ke dalam laporan keuangan perusahaan. Saat ini terdapat satu standar pengukuran karbon yang diakui oleh *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, yaitu *National Carbon Accounting Standards (NCAS)* yang merupakan standar nasional yang dimiliki oleh Australia. Teori dasar dari akuntansi karbon, yaitu: *carbon accounting is the process by which organizations account for and report on their greenhouse gas emissions* (Allen Prosser, 2013), sehingga akuntansi karbon diartikan sebagai proses pengukuran dan penyampaian emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. *Exit Price Accounting*, menurut Palea (2014), merupakan kombinasi konsep dari Chambers (1966, 1975), Sterling (1970), dan MacNeal (1970), yang melakukan pengukuran aset atas dasar nilai realisasi penjualan aset dengan harga pasar yang berlaku. Edwards dan Bells (1961) dalam Zeff (2010) mengusulkan penggunaan harga jual pasar sebagai metode pengukuran *Exit Price Accounting*. Metode ini dipilih karena PSAK 57 menyatakan bahwa provisi atau aset kontijensi harus dapat diestimasi dengan tepat menggunakan harga karbon pasar karbona saat ini. Berdasarkan kajian teoritis ini maka maksud studi ini adalah untuk mengembangkan kerangka teoritis dalam

menghitung kemampuan penyerapan dan potensi karbon yang hilang diakui sebagai emisi yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Pelaksanaan karbon offset terhadap kepemilikan karbon dan emisi yang dihasilkan, akan diukur, diakui, dicatat, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan PSAK. Pembahasan perlakuan akuntansi terkait karbon dari perspektif perusahaan sektor *non consumer cyclical* melakukan offset di akhir periode, sehingga terdapat dua kemungkinan pencatatan potensi serap karbon dalam kondisi surplus atau defisit. Harga jual karbon yang digunakan adalah nilai tukar karbon terhadap satuan moneter (USD) yang berlaku dalam *Carbon Trading*. *Carbon Trading*, (perdagangan karbon) merupakan kegiatan menjual kemampuan pohon untuk menyerap karbondioksida, untuk mengurangi keberadaan karbondioksida di atmosfer sehingga mengurangi Gas Rumah Kaca yang menyebabkan pemanasan global (Razak, 2010). Fokus dari akuntansi konvensional yakni pencatatan transaksi kegiatan operasional perusahaan, namun pada perkembangannya terdapat pada penyesuaian terhadap elemen-elemen lingkungan dalam laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan perdagangan karbon yang melakukan pencatatan transaksi berdasar pada prinsip akuntansi dan disebut sebagai *carbon accounting*. Pengukuran terhadap nilai karbon, dimulai dengan menghitung nilai surplus atau defisit karbon melalui proses karbon offset antara potensi serapan karbon dan emisi karbon yang dihasilkan. Proses offset ini merupakan proses saling hapus (PSAK 55), yang digunakan untuk penghitungan aset turunan dan kewajiban. Dalam hal ini, kewajiban akan dikurangi dengan aset yang dimiliki. Untuk mengakui dan mencatat

transaksi terkait karbon, digunakan akun-akun seperti pendapatan dan beban di luar usaha, aset tak berwujud, serta provisi. Akun-akun ini kemudian akan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, dengan akun pendapatan dan beban di luar usaha ditampilkan dalam laporan Laba/Rugi, sementara akun aset tak berwujud dan provisi akan disajikan dalam laporan posisi keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana perlakuan akuntansi karbon pada perusahaan *sector non consumer cyclical* Indonesia berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Eagle High Plantations, Tbk Tahun 2022 merupakan ilustrasi perhitungan rasio dalam penerapan akuntansi karbon yang telah didirikan sejak tanggal 6 November 2000 dengan nama PT Bumi Perdana Prima Internasional dan pada tahun 2000 berubah menjadi PT BW Plantation Tbk 7 dan telah mencatatkan saham perseroan terbatas di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Oktober 2009. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari penggunaan fiber dan cangkang untuk bahan bakar boiler dan total emisi GRK dari penggunaan POME, data nilai tukar pasar karbon pada program *carbon trading* (Siikamäki et al., 2012), data nilai kurs tengah Bank Indonesia. Tahapan analisis antara lain pengukuran akuntansi karbon dengan skenario surplus dan defisit, analisis kemungkinan pengakuan, penyajian, pencatatan dan pengungkapan akuntansi karbon dengan berdasar pada PSAK 19,23, 32, 57 dan tahapan akhir mengkaji dampak akuntansi karbon terhadap rasio keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pengukuran akuntansi karbon terdiri dari *pertama*, menghitung kandungan karbon pada penggunaan fiber dan cangkang untuk bahan bakar boiler dan penggunaan POME. Proses pengolahan di pabrik ini menghasilkan 4 jenis limbah yaitu janjang/tandan kosong, cangkang sawit, serat, dan limbah cair yang biasa disebut Palm Oil Mill Effluent (POME). Limbah padat akan dikembalikan ke tanah kebun untuk digunakan sebagai suplemen dan mulsa, sementara limbah padat berupa serat dan cangkang sawit dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler yang digunakan untuk mesin pembangkit listrik dan penunjang proses pemanasan dalam proses pengolahan TBS di pabrik. Limbah cair atau POME yang dihasilkan tidak boleh dibuang secara bebas ke sungai karena berpotensi mencemari lingkungan. Proses ekstraksi minyak sawit tidak menggunakan bahan kimia sehingga POME tidak mengandung racun namun pembuangan POME secara sembarangan ke sungai dapat mempengaruhi kadar oksigen dan ekologi di sungai. Di Indonesia, hampir semua pabrik menggunakan sistem kolam terbuka untuk mengolah POME sehingga nantinya dapat dialirkan ke sungai sebagian, dijadikan pupuk bagi tanaman kelapa sawit sendiri, dijadikan persediaan air untuk tanaman kelapa sawit ataupun melalui pemrosesan selanjutnya untuk dijadikan bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg).

Pada tahun 2019, Eagle High Plantations (EHP) membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sukadamai untuk mengelola limbah POME dari pabrik kelapa sawit di Kalimantan Selatan dan resmi beroperasi pada tahun 2020. Hasil dari proyek biogas ini merupakan sumber daya terbarukan yang menghasilkan listrik dengan kapasitas 2.400 kW. Listrik yang dihasilkan dari proyek

biogas tersebut dipasok ke PLN untuk membantu kebutuhan listrik di regional Kalimantan Selatan. Dengan penggunaan sumber daya terbarukan ini, Perseroan dapat mengurangi emisi sebesar 24.000 ton CO₂ di sepanjang tahun 2021. Perseroan dapat mengurangi emisi sebesar 15.000 ton CO₂ di sepanjang tahun 2022, dibandingkan dengan 10.000 ton CO₂ di tahun sebelumnya. Dengan adanya PLTBg ini, maka limbah POME dapat diolah menjadi listrik sehingga terjadi pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi karbon ini akan didaftarkan dalam suatu mekanisme untuk mendapatkan *carbon revenue* bagi Perusahaan.

EHP berkomitmen untuk mengelola lingkungan dan berupaya untuk selalu menerapkan praktik bisnis yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Melalui berbagai inisiatif yang pengelolaan limbah cair maupun padat menjadi energi terbarukan, EHP optimis dapat senantiasa mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan. Berbagai upaya yang dijalankan EHP dalam pengendalian emisi GRK merupakan komitmen Perseroan untuk mengurangi jumlah emisi dalam mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral (*Net Zero Emission/NZE*) di tahun 2060 dan mendukung SDGs Tujuan No.13 yaitu Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. EHP terus mengkaji aspek-aspek lainnya yang berpotensi menyumbang emisi. Dalam operasional sehari-hari, sumber emisi yang dihasilkan oleh Perseroan, antara lain berkaitan dengan kegiatan pengolahan, pengangkutan dan dari perubahan penggunaan lahan melalui konservasi hutan dan pencegahan kebakaran. Untuk itu, Perseroan terus berupaya untuk mengurangi emisi dengan cara melakukan perhitungan emisi Cakupan 1 yang berasal dari pengelolaan lahan, pemupukan, konsumsi energi pada pabrik, limbah cair dari

pengolahan minyak sawit, dan transportasi serta perhitungan emisi Cakupan dari proyek Biogas sedangkan perhitungan emisi Cakupan tidak dilakukan karena seluruh unit operasional perkebunan baik kebun maupun pabrik tidak menggunakan dan tidak membeli sumber energi listrik yang berasal dari dari luar Perseroan. Oleh karena itu, perhitungan emisi cakupan tidak applicable untuk dilakukan. Perseroan menggunakan kalkulator ISPO yang diadaptasi dari kalkulator IPCC untuk melakukan perhitungan emisi, sehingga perhitungan emisi yang dihasilkan hanya berdasarkan pemakaian material kimia, solar, pelumas, alih guna lahan, serta proses produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan limbah. EHP juga berupaya melakukan berbagai hal agar emisi yang dihasilkan mengalami penurunan, diantaranya yaitu:

Tidak melakukan pembakaran lahan dan menggunakan lahan gambut untuk penanaman baru. Sampai akhir tahun 2023, terdapat lahan gambut seluas 9.740 ha yang digunakan sebagai area tanam dan 2.695 ha sebagai lahan gambut konservasi.

Melakukan kajian NKT sebelum mengembangkan lahan baru untuk penanaman di kawasan rendah karbon dan mengetahui stok karbon di area perkebunan.

Mengganti sumber bahan bakar boiler dari solar menjadi cangkang/serat tandan.

Kedua, mengenakan perkiraan harga pasar transaksi emisi. Penetapan perkiraan harga pasar perdagangan emisi dilakukan karena harga pasar transaksi emisi digunakan untuk mengkonversi besarnya potensi penyerapan karbon yang hilang ke dalam satuan moneter. Harga yang digunakan adalah harga pasar hak emisi pada perdagangan emisi sebesar USD10/ton (Walhi 2007). **Ketiga**, penetapan asumsi kurs sebagai dasar nilai moneter yang masih dalam satuan USD, sehingga perlu dikonversi ke dalam rupiah. Kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah

kurs tengah Bank Indonesia dengan nominal Rp15.723 (www.bi.go.id) Kurs BI per 1 November 2024).

Keempat, menetapkan usulan formula penghitungan akuntansi karbon. Berdasar penjelasan-penjelasan di atas, maka dalam menghitung aspek-aspek terkait karbon, dilakukan penghitungan dengan usulan formula sebagai berikut:

$$Y=(\sum(nx1 \times ax1)+(nxi \times axi)) \times p \times b \dots\dots(1)$$

Keterangan:

- : Provisi
- nx1*: Jumlah pohon kategori usia
- axi*: Nilai kemampuan serap karbon
- p*: Harga pasar karbon
- b*: Kurs terkini

Pengakuan dan Pencatatan

Penyerapan karbon potensial yang dimiliki perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud sesuai PSAK 19 (2010), dan dikelompokkan sebagai *indefinitive intangible asset*. Pengakuan ini didasari oleh kriteria *definitive intangible asset* dalam PSAK 19 (2010), yang harus diamortisasi sesuai masa manfaatnya, diuji penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Kriteria-kriteria tersebut dapat terpenuhi oleh daya serap pohon yang memiliki umur yang sama dengan lama pohon ditanam atas karbon, dan telah mencapai masa tebang. Pengujian terhadap nilai daya serap pohon diuji setiap tahun untuk memperhitungkan pengurangan yang terjadi akibat pohon yang ditebang selama proses produksi.

Penyajian

Pada laporan posisi keuangan, aset akan ditulis di sisi debit, sementara kewajiban tercatat pada sisi kredit. Berdasarkan PSAK 57 (2009), aset kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan, sementara aset tak berwujud akan dicatat pada sisi debit dalam laporan

posisi keuangan. Aset dalam laporan posisi keuangan dibedakan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tak berwujud akan dikategorikan sebagai aset tidak lancar, dan penyajiannya diatur oleh PSAK 19 (2010). Aset tak berwujud ini kemudian akan diamortisasi hingga masa manfaatnya habis. Sedangkan kewajiban dipisahkan berdasarkan jatuh temponya, menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 57 (2009), penyajian kewajiban dalam laporan keuangan, tergantung pada kepastian terjadinya. Kewajiban yang memiliki kemungkinan lebih dari 50 persen terjadi disebut provisi dan disajikan dalam neraca seperti kewajiban pada umumnya. Sementara itu, kewajiban yang kemungkinan tidak terjadi dan nilainya sulit untuk diperkirakan dengan tepat (kewajiban kontijensi), cukup diungkapkan dalam catatan kaki pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Aspek terkait karbon diakui sebagai kewajiban provisi jangka pendek akan disajikan dalam akun kewajiban lancar. Pencatatan dan pelapora kewajiban provisi harus dilakukan secara penuh dengan memperkirakan nilai jatuh tempo (PSAK 57, 2009), dan karena jangka waktu jatuh tempo yang relatif pendek (kurang dari 12 bulan), perbedaan antara nilai estimasi saat ini dan nilai jatuh tempo biasanya tidak akan terlalu signifikan.

Pengungkapan

Pengaturan pengungkapan kewajiban dan aset yang diestimasi, dilakukan berdasarkan pada PSAK. Pertama, berdasarkan PSAK 57 (2009) mengharuskan setiap entitas untuk mengungkapkan informasi terkait kewajiban diestimasi, termasuk provisi, untuk setiap jenis kewajiban tersebut. “Nilai tercatat pada awal dan akhir periode, tambahan kewajiban diestimasi dibuat dalam periode berjalan, termasuk peningkatan jumlah yang

terjadi dan dibebankan pada kewajiban diestimasi selama periode bersangkutan. Sedangkan jumlah yang belum digunakan atau dibatalkan selama periode yang berjalan, Selain hal-hal di atas, perusahaan harus mengungkapkan pula uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Indikasi mengenai ketidakpastian jumlah arus keluar tersebut diperlukan untuk menyediakan informasi yang memadai, maka perusahaan harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur dalam paragraf 50 dan jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.” Sedangkan untuk aset diestimasi, PSAK 57 tidak mengatur mengenai pengungkapannya.

Dampak Terhadap Rasio Keuangan

Perlakuan akuntansi terkait karbon pastinya berdampak terhadap performa laporan keuangan yang mencerminkan persamaan akuntansi: aset = liabilitas + ekuitas, di mana jumlah pada sisi aset (debit), harus sama dengan jumlah pada sisi liabilitas + ekuitas (kredit) serta rasio keuangan perusahaan. Sehingga apabila dalam laporan posisi keuangan terdapat tambahan komponen provisi pada sisi kredit (liabilitas), maka akan terjadi perubahan nilai atas ekuitas pada sisi kredit karena jumlah liabilitas ditambah ekuitas harus seimbang dengan jumlah aset. Penurunan ekuitas sendiri terjadi karena akuntansi menganut *matching principle* dimana beban akan diakui pada saat produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Sehingga beban karbon akan dimasukkan ke dalam komponen penyusun laporan laba/rugi yang berdampak terhadap penurunan laba perusahaan, dan laba akan mempengaruhi besarnya nilai ekuitas akhir yang tercantum pada laporan posisi keuangan perusahaan.

Karena laba yang dihasilkan turun, maka nilai ekuitas akan turun.

Adanya tambahan akun provisi lancar, mengakibatkan nilai liabilitas lancar meningkat sehingga berdampak pada turunnya nilai rasio likuiditas. Hal ini dikarenakan dalam menghitung *current ratio*, *quick ratio* maupun *cash ratio*, besar nilai liabilitas lancar akan digunakan sebagai pembagi sehingga apabila nilai pembagi meningkat, maka nilai rasio akan turun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pencatatan dan pengungkapan pengakuan kepemilikan potensi penyerapan karbon diakui sebagai aset kontijensi atau aset tak berwujud diatur dalam PSAK 19 (2010) dan PSAK 57 (2009). Pembayaran biaya jasa lingkungan bisa diakui sebagai beban di luar usaha, atau beban lingkungan dan sosial, dimana pencatatan dan pengungkapannya diatur dalam PSAK 23 (2010) dan PSAK 32 (2007). Pengakuan pendapatan atas surplus potensi serap karbon dapat diakui sebagai pendapatan di luar usaha, yang pencatatan dan pengungkapannya diatur dalam PSAK 23 (2010) atau PSAK 32 (2007). Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan estimasi biaya jasa lingkungan sejak awal periode dapat mengakui sebagai provisi, yang pencatatan dan pengungkapannya diatur dalam PSAK 57 (2009). Pengakuan akun-akun tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak pada kinerja laporan keuangan yang tercermin pada rasio-rasio keuangan, seperti rasio solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas. Pada penelitian ini rasio likuiditas dan rentabilitas perusahaan mengalami penurunan, sedangkan rasio solvabilitas dapat mengalami peningkatan atau penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Allen Prosser, C. (2013). *Carbon accounting*

- and reporting the disclosure and reporting of carbon emissions in a growing trend for both investors and customers.* <http://www.vercoglobal.com>. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *No Title*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indonesia Dalam Angka Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2022*. <http://wwf.indonesia.go.id>.
- Dewi, P. P., & Edward Narayana, I. P. (2020). Implementasi Green Accounting, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3252. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p20>
- Edward Freeman, R., S. Harrison, J., C. Wicks, A., L. Parmar, B., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009a). *PSAK 2007*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009b). *PSAK No.19 Revisi 2010*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009c). *PSAK No.23 Revisi 2010*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009d). *PSAK No.32 Revisi 2010*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009e). *PSAK No.57 Revisi 2009*. Salemba Empat.
- Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (n.d.). *Annual Report 2021*.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Statistik Kehutanan Indonesia 2011* (Sub Direktorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, & Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Eds.)). KEMENTERIAN KEHUTANAN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022).
- Kementerian Keuangan RI. (2022).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan. (2019). *Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Mona Ganiem, L., & Kurnia, E. (2019). *Komunikasi Korporat: Konteks Teoretis dan Praktis* (D. Feirus (Ed.); 1st ed.). KENCANA (Prenadamedia).
- Nugroho, I. A. G., & Munari. (2021). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Financial Performance Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Listed Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 31–38. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/koopak/page31>
- Palea, V. (2014). Fair value accounting and its usefulness to financial statement users. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 102–116. <https://doi.org/10.1108/jfra-04-2013-0021>
- PwC. (2017). *Annual Report*.
- Razak, A. (2010). Kajian Yuridis CarbonTrade dalam Penyelesaian Efek Rumah Kaca. *Etika Dan Kebijakan Perudangan Lingkungan*, 1–32.
- S. Harrison, J., & C. Wicks, A. (2019). Stakeholder theory, value and firm performance. *Business Ethics Quarterly*, 23(1), 97–125. <https://doi.org/10.5840/beq20132314>
- Siikamäki, J., Sanchirico, J. N., & Jardine, S. L. (2012). Global economic potential for reducing carbon dioxide emissions from mangrove loss. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(36),

14369–14374.

<https://doi.org/10.1073/pnas.1200519109>

Simamora, H. (2002). *Akuntansi Manajemen* (2nd ed.). UPP AMP YKPN.

Taurisianti, M. M., & Kurniawati, E. P. (2016).
Perlakuan Akuntansi Karbon di
Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,
17(2), 81.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v17i2.273>

Ulum, I. (2022). *Intellectual Capital: Model
Pengukuran, Framework Pengungkapan,
dan Kinerja Organisasi* (6th ed.).
Universitas Muhammadiyah Malang.

UNFCCC (Kyoto protocol). (2012). *The kyoto
protocol mechanism international
emissions trading clean development
mechanism joint implementation.*
UNFCCC Germany.
<http://unfccc.int/resource/docs/publications/mechanisms>.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). (2007).
Perdagangan Karbon, Bali.
<http://walhibali.blogspot.com>.

FAKTOR-FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI STATUS KEPEMILIKAN RUMAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2022

Renta Yustie

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UWKS
rentayustie@uwks.ac.id

Novi Theresia Kiak

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undana
novi.kiak@staf.undana.ac.id

Betty Silvia Ayu Utami

UIN Sunan Ampel Surabaya
betty.silfia@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Seiring berjalannya waktu, fungsi rumah pun semakin berkembang. Khususnya di Indonesia jumlah penduduk tiap tahun semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin bertambah. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 34 Provinsi di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022. Variabel dalam penelitian adalah Status Kepemilikan Rumah, Produk Domestik Regional Bruto, Harga Rumah dan Jumlah Rumah. Perhitungan menggunakan alat analisis EViews 9 dengan melakukan uji hipotesis dan uji asumsi klasik maka diharapkan variabel yang digunakan dalam penelitian faktor-faktor ekonomi dan berpengaruh secara signifikan serta memiliki hubungan yang positif dalam status kepemilikan rumah.

Kata Kunci: Status Kepemilikan Rumah, Produk Domestik Regional Bruto, Harga Rumah, Produksi Rumah, Regresi Panel

ABSTRACT

Home is one of the basic needs for humans. Over time, the function of the house is also growing. Especially in Indonesia, the population is increasing every year, so the need for a place to live is also increasing. This research uses panel data with a sample of 34 provinces in Indonesia with a range from 2017 to 2022. The variables in the study are Home Ownership Status, Gross Regional Domestic Product, House Prices and Number of Houses. Calculations using the EViews 9 analysis tool by conducting hypothesis testing and classic assumption tests, it is expected that the variables used in the research are economic factors and have a significant influence and have a positive relationship in home ownership status.

Keywords: Home Ownership Status, Gross Regional Domestic Product, House Prices, House Production, Panel Regression

PENDAHULUAN

Rumah adalah suatu gejala struktural yang bentuk dan organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimiliki serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuni (Rapoport, 1996). Manusia sebagai penghuni rumah, budaya, serta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang erat, sehingga rumah sebagai lingkungan binaan merupakan refleksi dari kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan keluarga, organisasi sosial, serta interaksi sosial antar individu. Hubungan penghuni dengan rumahnya merupakan hubungan saling ketergantungan (*transactional interdependency*), yaitu manusia mempengaruhi rumah dan sebaliknya rumah mempengaruhi penghuninya.

Rumah bukan hanya sarana kehidupan semata, tetapi lebih merupakan proses bermukim, yaitu kehadiran manusia sebagai penghuni dalam menciptakan ruang hidup dalam rumah dan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai manusia seutuhnya menempati tempat yang utama dalam proses merancang rumah, sehingga perilaku penghuni, keinginan serta kebutuhan penghuni merupakan hal yang sangat penting dalam perancangan. Oleh karena perilaku manusia sebagai penghuni sangat menentukan kualitas dan bentuk rumah serta lingkungannya (Bell et al, 1976).

Rumah dapat diartikan sesuai dengan konteks sudut pandangnya, demikian pula dengan fungsinya. Rumah bukan sekedar bangunan tetapi juga merupakan suatu konteks yang memberikan peluang untuk interaksi dan aktivitas komunikasi yang akrab terhadap aspek kehidupan manusia. Di masyarakat telah berkembang suatu keadaan dimana rumah bukan hanya berperan sebagai hunian terutama dalam kaitan dengan penghuninya. John F.C. Turner (Turner, 1990) mengungkapkan bahwa rumah mempunyai berbagai fungsi dan semua fungsi tersebut tergantung pada tujuan yang ingin dicapai yang berbeda antara yang satu dan lainnya tergantung tempat dan waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayahmenandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Todaro dan Smith, (2008).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Menurut (Arifin, 2000) perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi:

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

- 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Subsektor Tanaman bahan makanan
 - b. Subsektor Tanaman perkebunan
 - c. Subsektor Peternakan
 - d. Subsektor Kehutanan
 - e. Subsektor Perikanan.
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, meliputi:
 - a. Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,
 - b. Subsektor Pertambangan Bukan Migas
 - c. Subsektor Penggalian.
- 3) Sektor Industri Pengolahan, meliputi:
 - a. Subsektor Industri Migas -Pengilangan Minyak Bumi- Gas Alam Cair (LNG),
 - b. Subsektor Industri Bukan Migas - Makanan, Minuman dan Tembakau - Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Barang Kayu dan Produk Lainnya - Produk Kertas dan Percetakan -Produk Pupuk, Kimia dan Karet - Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam, - Logam Dasar Besi dan Baja, - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi - Produk Industri Pengolahan Lainnya,
- 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, meliputi:
 - a. Subsektor Listrik,
 - b. Subsektor Gas,
 - c. Subsektor Air Bersih,
- 5) Sektor Konstruksi, mencakup konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sejenisnya.
- 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, meliputi:
 - a. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran,
 - b. Subsektor Hotel,
 - c. Subsektor Restoran
- 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, meliputi:
 - Subsektor Pengangkutan Angkutan Rel Angkutan Jalan Raya - Angkutan Laut - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Angkutan Udara - Jasa Penunjang Angkutan
 - b. Subsektor Komunikasi
- 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, meliputi:
 - a. Subsektor Bank
 - b. Subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank,
 - c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan
 - d. Subsektor Real Estate,
 - e. Subsektor Jasa Perusahaan.
- 9) Jasa-Jasa, meliputi:
 - a. Subsektor Pemerintahan Umum, - Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, -

Jasa Pemerintahan Lainnya b. Subsektor Swasta - Jasa Sosial Kemasyarakatan - Jasa Hiburan dan Rekreasi -Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4). Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5). Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob) 6). Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif).

Teori Harga

Harga merupakan nilai yang melekat pada suatu barang, pengurangan harga suatu barang akan menyebabkan lebih banyak barang yang diminta dan peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta (Nicholson, 1999). Perubahan harga suatu barang akan mempengaruhi permintaan barang lain, jika dua barang bersifat komplemen kenaikan harga salah satu barang itu akan mengurangi permintaan barang yang satunya lagi. Jika dua barang itu bersubstitusi maka kenaikan harga salah satu barang akan meningkatkan permintaan barang yang lainnya dan sebaliknya (Nicholson, 1999). Perubahan harga suatu barang memiliki efek yang menyebabkan perubahan pilihan-pilihan terhadap konsumsinya.

Pengendalian sewa dan beli pada harga tanah serta bangunan rumah dalam jangka pendek maka pemerintah akan menetapkan batas harga

tertinggi yang dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan rumah yang bertujuan untuk melindungi konsumen atau pembeli (Mankiw, 2019). Pengendalian harga sewa dalam jangka pendek tidak berdampak secara umum bagi pembeli atau konsumen karena dampak tersebut akan nampak setelah jangka panjang, disebabkan permintaan terhadap sewa dan beli terhadap tanah dan bangunan rumah bersifat inelastis pada jangka pendek. Tetapi secara jangka panjang dampak sewa dan beli terhadap tanah dan bangunan rumah bersifat elastis disebabkan pembeli dan penjual akan lebih respon terhadap kondisi pasar, pemilik tanah dan bangunan rumah menyikapi rendahnya nilai sewa dengan tidak membangun rumah baru serta mengabaikan perawatan pada rumah yang akan dijual, tetapi permintaan dari pembeli terhadap harga sewa dan beli tanah dan bangunan rumah yang murah akan mendorong mereka untuk meningkatkan konsumsi sewa dan beli terhadap tanah dan bangunan rumah, sehingga secara jangka panjang akan lebih bersifat elastis (Mankiw, 2019).

Pengendalian harga dasar menjaga agar harga berada pada tingkat harga yang berbeda dengan tingkat keseimbangannya. Kondisi harga dasar yang berada di bawah harga keseimbangan maka harga dasar tersebut tidak mengikat dan kekuatan pasar secara alami akan menggerakkan perekonomian menuju keseimbangan serta harga dasar tidak memberikan pengaruh apapun terhadap harga maupun jumlah yang dijual (Mankiw, 2019). Pengendalian harga dasar yang berada di atas harga keseimbangan maka harga dasar akan menjadi syarat yang mengikat di dalam pasar, kekuatan permintaan dan penawaran akan cenderung menggerakkan harga dasar menuju harga keseimbangan namun saat harga dasar menyentuh harga keseimbangan maka harga tersebut tidak dapat turun lebih jauh lagi sehingga harga pasar sama dengan harga dasar (Mankiw, 2019). Perekonomian dalam kondisi pasar bebas maka harga sangat berperan sebagai mekanisme penjatahan dan penjual dapat menjual pada tingkat harga yang beragam pada harga keseimbangan (Mankiw, 2019).

Teori Produksi Rumah

Teori produksi ialah teori yang pelajari banyak model input pada tahap teknologi khusus yang nantinya akan mendapatkan output tertentu (Sudarman dalam Sisno, 2000). Tujuan dari teori produksi adalah untuk menghasilkan tahap produksi yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Aziz N. (2003) menyatakan dalam teori produksi terdiri dua bagian, yaitu pertama, teori produksi dalam waktu dekat, dimana terdapat faktor produksi variabel dan tetap ketika produsen memakai faktor produksi.

Kedua, teori produksi dalam waktu panjang, dimana seluruh input yang dipergunakan yakni input variabel dan tidak ada input tetap, maka bisa dipahami bahwasanya terdapat dua jenis-jenis faktor produksi, yakni tenaga kerja dan modal. Sugiarto dkk. (2002) menyatakan dalam teori produksi adalah aktivitas yang dapat merubah input jadi output. Fungsi-fungsi produksi pada ekonomi dapat dikatakan pada fungsi produksi, di mana fungsi produksi menentukan total output maksimum yang mampu menghasilkan dari penggunaan banyak input dengan alat-alat tertentu.

Sadono Sukirno (2000) menyatakan bahwa penciptaan terjadi dalam fungsi produksi yaitu hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi. Faktor produksi disebut input dan total produksi disebut output. Fungsi produksi bisa disimpulkan dalam bentuk rumus berikut:

$$Q = f (K, L, R, T)$$

Dimana: Q = Jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu, K = Jumlah modal yang digunakan, L = Jumlah tenaga kerja yang digunakan, M= Variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi produksi. Jorsan dan Fathorozi (2010) mendefinisikan 3 model fungsi produksi, yakni fungsi produksi Leontief, fungsi produksi Cobb-Douglas, serta fungsi produksi CES. Dari berbagai model fungsi produksi yang ada, fungsi produksi Cobb-Douglas yang paling sering digunakan karena kemudahannya dibandingkan dengan fungsi produksi lainnya.

Adiningsih (dalam Sigit L, 2005) mendefinisikan fungsi produksi menetapkan seberapa besar output maksimum yang bisa dihasilkan bila total input terpilih yang dipergunakan pada serangkaian produksi. Bisa dikatakan, bahwa fungsi produksi merupakan fungsi yang menetapkan persamaan pada tingkat

produksi dan tingkat pemakaian input, oleh karena itu fungsi ini hanya menetapkan kaitan antara fisik dan input ataupun output.

Penelitian Sebelumnya

Mankiw, (2019) Pembeli selalu menginginkan harga yang lebih murah untuk barang yang diminatinya, sementara penjual menginginkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang diminati oleh pembeli maka tentunya hal ini menjadi kepentingan yang saling bertentangan antara pembeli dan penjual. Mankiw, (2019) Pemerintah akan menetapkan batas harga tertinggi (*price ceiling*) pada barang dan jasa serta pemerintah juga akan menetapkan harga minimum pada barang dan jasa yang mana harga ini menjadi harga dasar (*price floor*) berdasarkan aturan pemerintah. Penetapan harga tertinggi dan harga dasar mempengaruhi kondisi akhir di pasar, tentunya kondisi ini mencerminkan interaksi antara permintaan dan penawaran.

Varian (2003) Perubahan harga mempengaruhi respon terhadap jumlah barang yang dibeli oleh konsumen, ukuran besarnya respon jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan salah satu penentunya merupakan bentuk elastisitas. Varian (2003) Kondisi permintaan yang memberikan respon berubah terhadap perubahan harga barang tersebut merupakan bentuk elastisitas harga permintaan, sedangkan ukuran besarnya respon jumlah barang yang ditawarkan pada suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut merupakan elastisitas harga penawaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang diambil yaitu Status Kepemilikan Rumah Provinsi di Indonesia sebagai variabel *dependent* (terikat), Produk Domestik Regional Bruto, Harga Rumah dan Jumlah Rumah dimana semua data tersebut sebagai variabel *independent* (bebas). Data penelitian diolah dengan alat analisis berupa EViews 9.

Penelitian ini menggunakan model

persamaan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Sebagai *cross section* penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia dan sebagai *time series* penelitian ini adalah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$SKR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB_{it} + \alpha_2 HR_{it} + \alpha_3 JR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

SKR = Status Kepemilikan Rumah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

HR = Harga Rumah

JR = Jumlah Rumah

i = 34 Provinsi di Indonesia (*cross section*)

t = 2017-2022 (*time series*)

ε = *Error term*

α_0 = Alfa

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien parameter/*slope*/kemiringan dari X1, X2, X3

Tahapan estimasi perhitungan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan uji statistik yaitu Uji t, Uji F dan Uji *adjusted*. Tahapan selanjutnya melakukan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas dan uji linieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Model estimasi persamaan regresi data panel untuk penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan hasil regresi pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

kriteria	Koefisien	T-hitung	T-tabel	Probabilitas	Alfa	Keterangan
PDRB	1.69E-05	2.299163	1.65251	0.0227	0.05	Signifikan
HR	-0.000674	-0.157525	1.65251	0.8750	0.05	Tidak Signifikan
JR	0.000254	1.835371	1.65251	0.0682	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

Variabel harga rumah dan jumlah rumah masing-masing memiliki probabilitas tidak signifikan dengan alfa 5% atau 0,05. Variabel produk domestik regional bruto memiliki probabilitas signifikan dengan alfa 5% atau 0,05. Koefisien variabel Produk domestik regional bruto dan jumlah rumah bernilai positif artinya memiliki hubungan berbanding lurus dan searah antara variabel Produk domestik regional bruto dan jumlah rumah yaitu status kepemilikan rumah. Koefisien harga rumah bernilai negatif artinya memiliki hubungan berbanding terbalik atau tidak searah antara variabel harga rumah dengan variabel terikat yaitu status kepemilikan rumah.

Hasil uji Adjusted model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini terdapat di Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Adjusted

Kriteria	Nilai
<i>R-squared</i>	0.949507
<i>Adjusted R-squared</i>	0.938623

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.938623 artinya variabel bebas (*independent*) produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah secara bersama (simultan) mampu menjelaskan terhadap variabel terikat (*dependent*) status kepemilikan rumah dan sisanya sebesar 0,061377 dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel dalam model persamaan regresi data panel yang digunakan. Nilai *Adjusted R-squared* berada pada kisaran angka 0 (nol) sampai dengan 1, jika nilainya semakin mendekati angka 1 maka semakin baik dan sebaliknya.

Hasil uji F-statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini terdapat di Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Hasil Uji F-Statistik

Kriteria	Nilai
F-statistic	87.23340
F-tabel	2.42
Prob. F-statistic	0.000000
<i>a 5%</i>	0.05

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews9, 2023

Hasil uji F-Statistik memiliki nilai probabilitas F-Statistic sebesar 0,000000 yang nilainya lebih kecil dari nilai alfa 5% atau 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat status kepemilikan rumah. Hal ini diperkuat dengan nilai F-Hitung yang lebih besar dari nilai F-Tabel.

Hasil uji T-statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini terdapat di Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4: Hasil Uji T-Statistik

Kriteria	Koefisien	T-hitung	T-tabel
PDRB	1.69E-05	2.299163	1.65251
HR	-0.000674	-0.157525	1.65251
JR	0.000254	1.835371	1.65251

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

Hasil uji T-Statistik untuk variabel bebas produk domestik regional bruto adalah tidak signifikan karena nilai T-Hitung lebih besar dari alfa 5% atau 0,05 dan nilai T-Hitung lebih besar dari T-Tabel. Variabel bebas (*independent*) produk domestik regional bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu status kepemilikan rumah.

Hasil uji T-Statistik untuk variabel bebas harga rumah dan jumlah rumah adalah signifikan karena nilai T-Hitung kurang dari alfa 5% atau 0,05 dan nilai T-Hitung kurang dari T-Tabel. Variabel bebas jharga rumah dan jumlah rumah secara parsial berpengaruh terhadap variabel bebas atau setiap variabel bebas (*independent*) yaitu harga rumah dan jumlah rumah berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu status kepemilikan rumah.

Hasil uji asumsi klasik pada model persamaan regresi data panel dalam penelitian adalah:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

SKR	SKR	PDRB	HR	JR
	1.000000	-0.309767	-0.368755	-0.120898
PDRB	-0.309767	1.000000	0.595319	0.623953
HR	-0.368755	0.595319	1.000000	0.288002
JR	-0.120898	0.623953	0.288002	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala Multikolinieritas karena semua variabel bebas (produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah) dan variabel terikat (status kepemilikan rumah) memiliki nilai dibawah 0,8 sehingga bebas dari gejala Multikolonieritas.

Tabel 6: Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
Durbin-Watson	1.347172
Nilai d_L	1.7382
Nilai d_U	1.7990

Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

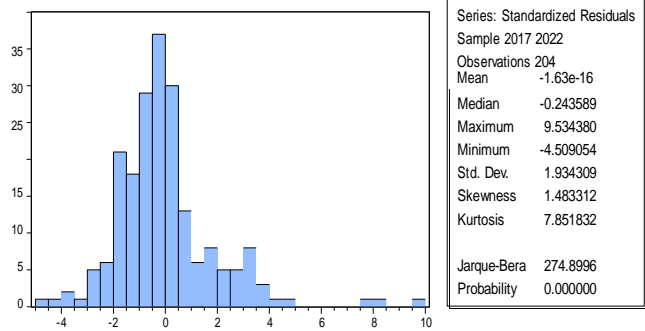
Tabel 6 di atas menunjukkan tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai d_U , sehingga terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 7: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	1388.665	561	0.0000
Pesaran scaled LM	24.70918		0.0000
Bias-corrected scaled LM	21.30918		0.0000
Pesaran CD	26.84471		0.0000

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai statistik memiliki nilai tidak signifikan dibawah alfa (5% = 0,05) sehingga terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8: Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data dengan EViews 9 diolah oleh penulis, 2023

Tabel 8 di atas menunjukkan hasil uji normalitas dengan nilai Probability kurang dari alfa (5% = 0,05) maka terdistribusi tidak normal pada model persamaan regresi data panel ini.

Pembahasan

Variabel produk domestik regional bruto (X1) Dari hasil penelitian data Statistik Regresi Linier Berganda menggunakan alat bantu *Eviews* 9 diperoleh bahwa koefisien regresi dari produk domestik regional bruto sebesar 1.69E-05. Positif menunjukkan arah produk domestik regional bruto akan menyebabkan penurunan status kepemilikan rumah sebesar 1.69E-05 persen. Nilai t-hitung produk domestik regional bruto sebesar 2.299163 lebih besar di dibandingkan t-tabel sebesar 1.65251, atau dapat dituliskan (2.299163)<1.65251. Sedangkan probabilitas produk domestik regional bruto sebesar 0.0227 lebih kecil dari nilai α (alpha) 0.05 atau bisa dituliskan 0.0227 > 0.05 α (alpha) yang berarti bahwa produk domestik regional bruto menunjukkan taraf Signifikan.

Variabel Harga Rumah (X2) Dari hasil penelitian data Statistik Regresi Linier Berganda menggunakan alat bantu *Eviews* 9 diperoleh bahwa koefisien regresi dari Harga Rumah sebesar -0.000674. Negatif menunjukkan arah hubungan berlawanan arah, maka artinya Harga Rumah akan menyebabkan penurunan status kepemilikan rumah sebesar -0.000674 persen. Jumlah t-hitung Harga Rumah sejumlah -0.157525 lebih kecil di dibandingkan t-tabel sebesar 1.65251, atau dapat dituliskan (-0.157525) > 1.65251. Sedangkan probabilitas Harga Rumah sebesar 0.8750 lebih besar dari nilai α (alpha) 0.05 atau bisa dituliskan

$0.8750 < 0.05$ α (alpha) yang berarti bahwa Harga Rumah menunjukkan taraf tidak Signifikan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga rumah di Indonesia dapat dijelaskan pada probabilitas bahwa memiliki nilai yang tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis faktor diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga perumahan di Indonesia adalah keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Swastha dan Irawan (2005) bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah.

Variabel Jumlah Rumah (X3) Dari hasil penelitian data Statistik Regresi Linier Berganda menggunakan alat bantu *Eviews 9* diperoleh bahwa koefisien regresi dari Jumlah Rumah sebesar 0.000254. Positif menunjukkan searah korelasi yang, maka artinya penambahan 1 persen Jumlah Rumah menyebabkan penurunan Jumlah Rumah sebesar 0.000254persen. Nilai t-hitung Jumlah Rumah sebesar 1.835371 lebih kecil di bandingkan t-tabel sebesar 1.65251, atau dapat dituliskan $(1.835371) > 1.65251$. Sedangkan probabilitas Jumlah Rumah sebesar 0.0682 lebih besar dari nilai α (alpha) 0.05 atau bisa dituliskan $0.0682 > 0.05$ α (alpha) yang berarti bahwa Jumlah Rumah menunjukkan taraf tidak signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah berpengaruh signifikan terhadap variabel status kepemilikan rumah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji - f yang menghasilkan uji statistik f - hitung variabel produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah lebih besar dari

pada f -tabel. Secara parsial variabel produk domestik regional bruto, harga rumah dan jumlah rumah berpengaruh signifikan terhadap status kepemilikan rumah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji - t.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis serta pembahasan maka dapat diberikan beberapa saran antara lain variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap status kepemilikan rumah. Oleh karena itu produksi rumah harus lebih di tingkatkan karena jumlah penduduk akan semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wiranata. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepeilikan Rumah di Perumahan Permata Arsandi Denpasar Timur*. vol. 20, no. 2, Juli 2016.
- Hermin Werdiningsih. (2015). *Perubahan Tata Letak Ruang Rumah Tinggal disepanjang Jalan Utama Lingkungan dikaitkan dengan Kegiatan Ekonomi*. vol. 15, no. 2, pp. 107-124, Jul. 2015.
- Shaulim. (2022). *Pengaruh Hasil Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten Bengkayang)*
- Suryono, (2010). *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*. Universitas Hasanudin.
- Widiatma Nugroho. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Semarang

**PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE
2018-2023**

Rahil

Universitas Bina Sarana Informatika
rahilrahil185@gmail.com

Dwiyatmoko Puji Widodo

Universitas Bina Sarana Informatika
dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

Yuni Siti Nuraeni

Universitas Bina Sarana Informatika
yuni.yns@bsi.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dasar pembiayaan daerah, kemampuan suatu daerah untuk menggali PAD akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut. Salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa berpengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan: (1) Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah (2) Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan periode 2018-2023. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,036 (2) Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,388 (3) Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,035.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas Pendaptan Asli Daerah, Efisiensi Belanja Daerah

ABSTRACT

Regional Original Income (PAD) is the basis of regional financing, the ability of a region to explore PAD will have an impact on the growth and development of the region. One of the local government agencies responsible for environmental management is the DKI Jakarta Environment Agency. The purpose of this study is to find out how much the financial ratio affects financial performance: (1) The effectiveness of PAD on Regional Financial Performance (2) the efficiency of Regional Expenditure on Regional Financial Performance for the period 2018-2023. The samples used are the Budget Realization Report and the Performance Report of Government Agencies of the DKI Jakarta Provincial Environment Agency for the 2018-2023 Period which have been audited by the Financial Audit Agency (BPK). The results of this study show that (1) The effectiveness of PAD has an effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.036 (2) Regional Expenditure Efficiency has no effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.388 (3) The PAD Effectiveness Ratio and Regional Expenditure Efficiency together have a significant effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.035.

Keywords : Regional Financial Performance, Effectiveness of Regional Original Funding, Regional Expenditure Efficiency

PENDAHULUAN

Dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, akuntansi sektor publik telah maju secara signifikan. Menurut undang-undang saat ini, pemerintah daerah diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi ini memungkinkan setiap daerah atau kabupaten untuk secara mandiri meningkatkan pendapatan mereka untuk kepentingan warganya. Peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah harus mengarah pada hasil yang lebih baik, mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kinerja mereka secara kritis. Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga sektor publik dengan sangat penting. Akuntabilitas memperlihatkan sejauh mana lembaga sektor publik menggunakan dana publik dengan baik dan memastikan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaannya, termasuk dalam distribusi sumber daya ekonomi melalui pelaksanaan manajemen publik yang efisien. (SAIFRIZAL, 2022)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah satu dari sekian banyak organisasi yang bertugas melaksanakan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas ini menyusun Laporan Kinerja Pemerintah dan Perjanjian Kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran di bawah pimpinan Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Al-Jauhari, 2021)

Salah satu komponen utama APBD adalah pendapatan daerah yang termasuk dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan ini terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk mendorong desentralisasi. Namun, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran memiliki korelasi yang lebih kuat dengan pengeluaran daerah daripada pendapatan asli daerah.

Pengeluaran dan pendapatan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta berflukasi, menunjukkan betapa pentingnya menggunakan laporan belanja daerah dan pendapatan asli daerah dari laporan realisasi anggaran untuk mengetahui bagaimana sumber daya ekonomi diterima dan digunakan. Dengan mempertimbangkan efektivitas pendapatan daerah dan efisiensi belanjanya, rasio keuangan ini menilai apakah kinerja keuangan telah mencapai tingkat kepentingan yang sesuai dengan anggarannya.

Analisis rasio keuangan tertentu yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah unsur proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan. Maka dari itu, APBD bisa digunakan sebagai patokan untuk menentukan signifikansi kinerja keuangan pemerintah. Ketika mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah yang ditugaskan untuk pembangunan dan layanan masyarakat, akuntabilitas keuangan sangat penting. Berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, penilaian pemerintah tidak berfokus pada laba bersih atau keuntungan (*profit* atau *net income*). Sebaliknya, tujuan keuangan berpusat di sekitar manajemen anggaran, dengan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut sebagai surplus atau defisit. (Awaliyah & Efendri, 2019).

Kinerja keuangan daerah merujuk pada kapabilitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung layanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dengan efektifitas, efisiensi, keekonomisan, akuntabilitas, dan transparansi dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. (IJTIHAD & HARSONO, 2024).

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan daerah. Penelitian Rauhul Ijtihad (2024) Rasio kemandirian daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah adalah beberapa variabel yang digunakan. Kemandirian daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif, efektifitas PAD tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

(Nur Shafira Anynda, 2020) Hal serupa juga yang dilakukan dengan membandingkan variabel Kemandirian Daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah. Menurut penelitiannya di BPKAD. Tiga variabel yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu kemandirian, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah.

(Aulia & Sari, 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

KAJIAN TEORI

Rasio Keuangan

Menurut (Sartika, 2019) salah satu strategi untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari sudut pandang manajemen keuangan pemerintah diteliti melalui analisis rasio-rasio keuangan terkait dengan Anggaran APBD yang sudah disetujui dan dieksekusi. Fokus penelitian ini yaitu rasio keuangan spesifik berupa rasio Efektifitas PAD dan rasio Efisiensi Belanja Daerah.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo, (2018:146) dalam (SAIFRIZAL, 2022) yang mengatakan bahwa “definisi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu merupakan perbandingan antara outcomedan output yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program yang telah disusun dan direncanakan dengan target yang telah ditetapkan”. Rasio ini dievaluasi dengan mengevaluasi kapasitas sebenarnya dari suatu daerah dengan membandingkan hasil aktual dari pendapatan asli daerah yang diantisipasi dengan target yang sudah disesuaikan. Pendapatan dari perencanaan pendapatan asli daerah harus dilakukan perbandingan dengan target untuk menyelesaikan perhitungan ini. Berikut ini adalah urutan perhitungan yang dilakukan:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Pemerintah daerah harus menentukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan total pendapatan mereka guna menilai efisiensi dari kegiatan pengumpulan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengumpulan pendapatan dianggap efisien jika rasio biaya terhadap pendapatan nilainya kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Lebih rendahnya rasio menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

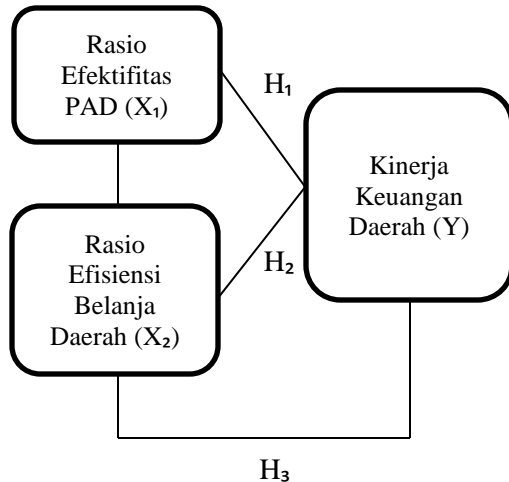
$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Selanjutnya menurut Mariani, (2013:64) dalam (SAIFRIZAL, 2022) “Kinerja keuangan daerah adalah Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat sehingga daerah dapat mengelola dana untuk kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Hipotesis

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, Adapun hipotesis penelitian bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Hipotesis Penelitian
Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

H₀: Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

H₁: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

H₀: Rasio Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

H₂: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

H₀: Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

H₃: Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai data kuantitatif berdasarkan hasil rasio yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data historis atau data sekunder yang terdokumentasi dan studi pustaka, digunakan dalam proses pengumpulan data dari bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kriteria sampel yang digunakan ialah data Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023

Teknik Analisis Data

Menurut (Sutriani & Octaviani, 2019), “Tujuan analisis data adalah untuk membuat data kuantitatif lebih mudah dipahami. Hasil analisis ini paling sering disajikan dalam bentuk data frekuensi, tabel, atau crosstab, dengan atau tanpa perhitungan statistik. Analisis data menggunakan model statistik parametrik. Model ini digunakan untuk menentukan parameter populasi menggunakan statistik dan mengukur populasi menggunakan data sampel”.

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk melakukan pengujian. Menurut (Prasetyo et al., 2021) Regresi linier merupakan sebuah metode statistik guna menilai kuatnya hubungan yang terjadi pada variabel dependen dan independen. Metode ini sering digunakan dalam analisis untuk memahami hubungan antara variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X), yang juga dikenal sebagai variabel prediktor. Persamaan berikut ini sering digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Daerah

α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X₁ = Rasio Efektifitas PAD

X₂ = Rasio Efisiensi Belanja Daerah

e = Error

Pengolahan data ini digunakan untuk melakukan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis: Uji T, Uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimu	Maxi	Mean	Std.
		m	mum		Deviation
Efektivitas PAD	6	95,51	190,48	126,710	38,5680
Efisiensi Belanja Daerah	6	85,33	95,14	90,7650	4,49916
Kinerja Keuangan	6	64,39	95,16	85,8933	11,95824
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Analisis deskriptif yang tersaji dalam tabel 1 mengindikasikan rasio

1. Rasio efektivitas PAD mempunyai nilai *minimum* 95,51, *maximum* 190,48, *mean* 126,7100 dan *std deviation* 38,56804.
2. Rasio efisiensi belanja daerah mempunyai nilai *minimum* 85,33, *maximum* 95,14, *mean* 90,7650 dan *std deviation* 4,49916.
3. Kinerja Keuangan mempunyai nilai *minimum* 64,39, *maximum* 95,16, *mean* 85,8933 dan *std deviation* 11,95824.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

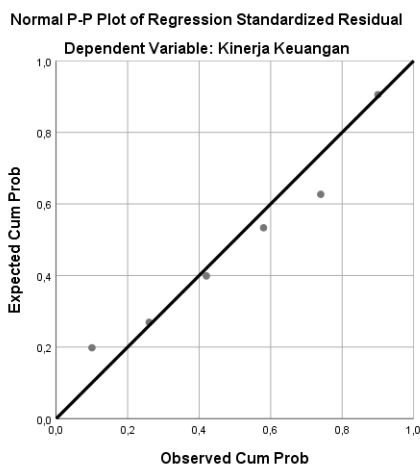
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean
	,0000000
	Std. Deviation
	3,90977843
Most Extreme Differences	Absolute
	,172
	Positive
	,172
	Negative
	-,137
Test Statistic	,172
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Uji Kolmogorov-Smirnov ditujukan dalam uji normalitas berdasarkan tabel 2, dan hasilnya adalah 0,172. Hal tersebut menunjukkan terjadi distribusi normal pada variabel penelitian karena lebih besarnya nilai

taraf signifikansi 0,200 dari pada tingkat kesalahan 0,05, menandakan bahwa variabel penelitian didistribusikan secara normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Penyebaran data terjadi di sekitar dan mengikuti garis diagonal yang bisa diamati dari plot probabilitas normal pada Gambar 2 Hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan distribusi data secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Efektivitas PAD	,723	1,384
	Efisiensi Belanja Daerah	,723	1,384

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Data pada tabel 3 menunjukkan jika variabel rasio efektivitas PAD (X1) dan rasio efisiensi belanja daerah (X2 memiliki nilai VIF sebesar 1,384 yang nilainya kurang dari 10. Sehingga bisa diarahkan jika tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada model regresi penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	24,816		1,616	,205
Efektifitas PAD	,028	,471	1,550	,219
Efisiensi Belanja Daerah	-,281	-,552	-1,816	,167

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4, bisa diamati nilai signifikansi pada variabel Rasio Efektivitas PAD (X_1) yaitu 0,219 dan variabel Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X_2) yaitu 0,167. Model ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan, karena kedua variabel memiliki signifikansi 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,43614
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	6
Z	1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Tabel 5 menunjukkan nilai Asymp dan Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga bisa diartikan tidak adanya autokorelasi pada ini.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	63,702		1,086	,357
Efektifitas PAD	-,251	-,808	-3,638	,036
Efisiensi Belanja Daerah	,594	,224	1,007	,388

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil pengujian antara Rasio Efektivitas PAD (X_1) dengan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X_2) ditunjukkan pada Tabel 6. Nilai koefisien regresi untuk Rasio Efektivitas PAD (X_1) sebesar -0,251, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerah (Y). dan 0,594 merupakan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X_2) pada variabel independen, engan nilai konstanta sebesar 63,702. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 63.702 + 0.251X_1 + 0.594X_2$. Berdasarkan pengujian persamaan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 63,702 mencerminkan tidak adanya variabel rasio efektivitas PAD (X_1) dan rasio efisiensi belanja daerah (X_2). Kinerja keuangan daerah sebesar 63,702.
- Nilai koefisien Rasio Efektivitas PAD (X_1) yaitu 0,251 yang menjelaskan dengan nilai variabel lain tetap, maka kenaikan Rasio Efektivitas PAD (X_1) yaitu 1% akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar -0,251.
- Nilai koefisien rasio efisiensi belanja daerah (X_2) mempunyai nilai 0,594 yang menunjukkan nilai konstan variabel independen lainnya. Peningkatan rasio efisiensi belanja daerah (X_2) sebesar 1% meningkatkan kinerja fiskal daerah sebesar 0,594.

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	63,702		1,086	,357
Efektifitas PAD	-,251	-,808	-3,638	,036
Efisiensi Belanja Daerah	,594	,224	1,007	,388

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil uji-t ditunjukkan pada Tabel 7, di mana derajat kebebasannya adalah $df = (n-k)$ atau $df = (6-3) = 3$, dan nilai t-tabel untuk signifikan adalah 0,05. Hasilnya, 3,182 adalah hasil t-tabel. Berikut ini adalah hasil dari penjelasan dari variabel yang diamati:

a. Variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji t menjelaskan jika rasio efektivitas PAD (X1) berpengaruh signifikan pada keberhasilan keuangan daerah (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari ambang batas 0,05 ($0,036 < 0,05$), yang mengindikasikan adanya signifikansi secara statistik. Demikian pula, hasil uji-t sebesar -3,638 lebih kecil dari nilai kritis 3,182 ($-3,638 < 3,182$), yang lebih lanjut mendukung signifikansi temuan secara statistik.

b. Variabel Efisiensi Belanja Daerah

Hasil uji-t menggambarkan rasio efisiensi belanja daerah (X2) tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan regional (Y). Variabel efisiensi belanja daerah secara statistik tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,388 yang lebih besar dari ambang batas 0,05 ($0,388 > 0,05$). Selain itu, nilai t-test sebesar 1,007 lebih kecil dari nilai t kritis sebesar 3,182 ($1,007 < 3,182$).

Uji F

Dengan menggunakan Ftabel pada tingkat signifikansi 0,05, F tabel memperoleh nilai 9,55, yang digunakan untuk mengevaluasi hasil uji F sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	638,566	2	319,283	12,532	,035
Residual	76,432	3	25,477		
Total	714,998	5			

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan keuangan daerah (Y) secara signifikan nilai yang dihasilkan, 0,035, lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) berdasarkan nilai signifikansi yang diberikan pada Tabel 8. Selanjutnya, nilai uji F hitung yang dihasilkan adalah sebesar 12,532, yang lebih tinggi dari nilai F tabel sebesar 9,55 ($12,532 > 9,55$) yang diperoleh. Dengan demikian, dipengaruhi oleh ukuran-ukuran.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

Hubungan negatif yang terjadi pada rasio efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dari analisis data yang menerapkan uji regresi linier berganda yang menolak H_0 dan menerima H_1 . Hipotesis t memaparkan hasil thitung yang lebih kecil dari ttabel ($-3,638 < 3,182$) dan $0,036 < 0,05$ adalah nilai signifikansi

Menurut penelitian lain oleh Risya Aulia (2023) dan Putri & Darmayanti (2019) kemanjuran PAD secara signifikan dan negatif berpengaruh pada kinerja keuangan, hasil penelitian ini selaras dengan temuan tersebut. Namun, penelitian Rauhul Ijtihad (2024) dan Meilany S.D. Liow (2019), menunjukkan tidak ada pengaruh efektivitas PAD dan tidak signifikan dengan kinerja keuangan, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah DLH Prov.Jakarta

H_0 diterima dan H_2 ditolak berdasarkan hasil analisis data. Hal tersebut mengindikasikan kinerja keuangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh rasio efisiensi belanja daerah. Uji regresi linier berganda digunakan dalam menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan ini. Temuan dari uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa thitung[^] ttabel ($1,007 < 3,182$) dan $0,388 > 0,05$ adalah nilai signifikansi.

Menurut Deah Ayu Bantari (2022) dan Siska Yulia Defitri (2021), efisiensi belanja daerah tidak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan dan tidak signifikan secara statistik. Studi ini mendukung kesimpulan mereka. Namun, temuan dari penelitian ini tidak selaras dengan Dessy Ari Permatasari (2022), Mulana Ramadhan (2022), Nur Shafira Anynda (2020), Rauhul Ijtihad (2024), dan Meilany S.D. Liow (2019), yang menunjukkan jika efisiensi belanja daerah

memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov.Jakarta

Menurut analisis data dari uji regresi linier berganda, H_0 ditolak dan H_3 diterima yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara simultan dipengaruhi oleh tingkat rasio efektifitas PAD dan tingkat rasio efisiensi belanja daerah. Dari f_{tabel} (12,532 > 9,55), pengujian hipotesis f menghasilkan hasil f_{hitung} dan nilai signifikansi (0,035 < 0,05), maka rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rauhul Ijtihad (2024), Dessy Ari Permatasari (2022), Nur Shafira Anynda (2020), dan Meilany S.D Liow (2019), yang menunjukkan bahwa efektifitas PAD dan efisiensi belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dan stimultan dengan kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi dari Efektifitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2023. Kesimpulan didapatkan dari pembahasan yang dianalisis, sehingga kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efektifitas PAD sebesar -3,638 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,036 < 0,05).
2. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efisiensi Belanja Daerah sebesar 1,007 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,388 > 0,05).

3. Uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 12,352 > F_{tabel} sebesar 9,55 dan tingkat signifikansi sebesar (0,035 < 0,05)

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran pada peneliti selanjutnya akan bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan yang akan dijadikan bahan informasi dan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Didalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan periode selama 6 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan memiliki sampel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, A. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Dialog*, 44(1), i–Vi.
- Aulia, R., & Sari, I. (2023). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dengan Belanja Pegawai Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021). *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 152–167. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- IJTIHAD, R., & HARSONO, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Nur Shafira Anynda. (2020). *PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN*

*BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH.*

- Prasetyo, V. R., Lazuardi, H., Mulyono, A. A., & Lauw, C. (2021). Penerapan Aplikasi RapidMiner Untuk Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Dengan Metode Linear Regression. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i1.2021.8-17>
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–203. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 148. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.